

MAKALAH DISKUSI

Menyoal Dampak COVID-19 pada Demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara

Joshua Kurlantzick
November 2020

Council on Foreign Relations (CFR) adalah organisasi keanggotaan independen, nonpartisan, kelompok cendekiawan, dan penerbit yang didedikasikan untuk menjadi narasumber bagi anggotanya, pejabat pemerintah, eksekutif bisnis, jurnalis, pendidik dan pelajar, pemimpin sipil dan agama, serta warga lainnya yang tertarik untuk membantu mereka lebih memahami dunia dan pilihan kebijakan luar negeri yang dihadapi Amerika Serikat dan negara lain. Didirikan pada tahun 1921, CFR menjalankan misinya dengan mempertahankan keanggotaan yang beragam, termasuk program khusus untuk mempromosikan minat dan mengembangkan keahlian bagi generasi pemimpin kebijakan luar negeri di masa mendatang; mengadakan pertemuan di kantor pusatnya di New York dan di Washington, DC, dan kota-kota lain tempat pejabat pemerintah senior, anggota Kongres, pemimpin global, dan pemikir terkemuka datang bersama-sama dengan anggota CFR untuk mendiskusikan dan memperdebatkan masalah internasional yang penting; mendukung Program Studi yang mendorong penelitian independen, memungkinkan para cendekiawan CFR untuk membuat artikel, laporan, dan buku dan mengadakan diskusi meja bundar yang menganalisis isu-isu kebijakan luar negeri dan membuat rekomendasi kebijakan yang konkret; menerbitkan *Foreign Affairs*, jurnal terkemuka tentang urusan internasional dan kebijakan luar negeri A.S.; mensponsori Satuan Tugas Independen yang menghasilkan laporan dengan temuan dan petunjuk kebijakan tentang topik kebijakan luar negeri yang paling penting; dan menyediakan informasi serta analisis terkini tentang peristiwa dunia dan kebijakan luar negeri Amerika di situs webnya, CFR.org.

Council on Foreign Relations tidak mengambil posisi kelembagaan dalam masalah kebijakan dan tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah A.S. Semua pandangan yang diungkapkan dalam publikasinya dan di situs webnya adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penulis atau para penulis.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang CFR atau makalah ini, silakan tulis surat ke Council on Foreign Relations, 58 East 68th Street, New York, NY 10065, atau hubungi kantor Komunikasi di 212.434.9888. Kunjungi situs web kami, CFR.org.

Hak cipta © 2020 oleh the Council on Foreign Relations®, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Makalah ini tidak boleh diproduksi ulang secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk apa pun di luar produksi ulang yang diizinkan oleh Pasal 107 dan 108 Undang-Undang Hak Cipta A.S. (17 U.S.C. Pasal 107 dan 108) dan kutipan dari peninjau untuk pers publik, tanpa izin tertulis secara tersurat dari Council on Foreign Relations.

Makalah ini dapat ditulis dengan dukungan besar dari Henry Luce Foundation.

Pendahuluan

Asia Selatan dan Tenggara telah menunjukkan hasil yang beragam dalam memerangi pandemi virus Corona tetapi pandemi COVID-19 telah menjadi keuntungan politik bagi para pemimpin yang tidak liberal. (Pemimpin yang tidak liberal merongrong masyarakat terbuka dan sistem politik bebas; mereka biasanya masih mengizinkan pemilihan umum, tetapi merusak atau menghancurkan secara langsung lembaga dan norma politik serta menyerang kebebasan sipil.) Politisi semacam ini biasanya adalah pemimpin seperti Perdana Menteri India Narendra Modi, yang terpilih dalam pemilihan umum bebas dan adil, dan pemimpin yang lebih autokrasi seperti Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang pemilihan umumnya semakin tidak bebas dan tidak adil. Di Asia Selatan dan Tenggara, pemimpin yang tidak liberal, banyak di antaranya adalah pemimpin populis yang tidak liberal, telah menggunakan pandemi sebagai peluang untuk mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi, terlepas dari apakah tindakan ini berkontribusi pada tanggapan kesehatan masyarakat yang sebenarnya.¹

Asia Selatan dan Tenggara mengalami beberapa kemunduran demokrasi terkait COVID-19 yang paling ekstrem di dunia. Bahkan sebelum virus Corona muncul, tumbuhnya polarisasi politik, populisme dan sektarianisme yang tidak liberal, warisan pemerintahan otoriter, dan pengaruh militer yang berkelanjutan dalam politik telah merongrong politik demokrasi di kawasan ini.² Dan memerangi COVID-19 memang membutuhkan beberapa pembatasan kebebasan, setidaknya sampai tersedia vaksin yang efektif. Faktanya, bahkan beberapa negara yang sudah lama menganut paham demokrasi di kawasan negara-negara maju telah berjuang keras untuk menyeimbangkan penanganan masalah kesehatan masyarakat dengan melindungi kebebasan warga negara. Sementara itu, ketika media berita di seluruh dunia terus berfokus pada pandemi, kemunduran demokrasi di negara berkembang kurang mendapatkan perhatian.

Konsolidasi pengaruh politik era COVID-19 harus dilawan guna memastikan bahwa politisi tidak dapat menggunakan pandemi untuk mengumpulkan lebih banyak kekuasaan secara permanen. Di Asia Selatan dan Tenggara, pembela lembaga dan norma demokrasi harus mendukung pemilihan umum yang aman dan berupaya untuk memastikan bahwa, bahkan jika pemimpin telah mengumpulkan kekuasaan ekstensif untuk melawan pandemi, kekuasaan ini dibatasi waktunya dan bahwa sudah ada rencana untuk kembali ke kondisi politik normal. Di negara-negara tempat jumlah kasus COVID-19 dan kematian relatif rendah, seperti Malaysia dan Thailand, pendukung hak dan lembaga demokrasi harus menggunakan aksi demonstrasi, sesi parlemen, dan media sosial – dengan tindakan pencegahan kesehatan yang tepat – untuk menekan pemerintah. Di negara-negara yang gagal menangani COVID-19 secara efektif, pihak oposisi perlu menyoroti kesalahan ini dan menunjukkan bahwa membatasi kebebasan politik tidak menjamin hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik.³

Aktor eksternal juga memiliki peran yang dapat dimainkan. Amerika Serikat bekerja sama dengan sangat efektif di kawasan ini dengan negara-negara yang lebih bebas, dan banyak pemimpin yang tidak liberal, seperti Rodrigo Duterte dari Filipina yang terbukti menjadi mitra yang tidak dapat diprediksi dan sulit untuk diajak bekerja sama. Negara-negara demokrasi terkemuka, yang selama

beberapa dekade telah mendorong perubahan demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara perlu menyoroti kelemahan dalam gagasan bahwa negara-negara otoriter dapat mengatasi COVID-19 dengan lebih baik, perlu mendukung pendukung demokrasi di kawasan itu, dan perlu melawan upaya yang dilakukan oleh pihak autokrasi terkemuka yang menyatakan bahwa penguasa otoriter – bukan demokrasi – efektif dalam memerangi COVID-19.⁴

Kemunduran Gerakan Demokrasi

Kemajuan demokrasi Asia Selatan dan Tenggara telah terbalik, setidaknya sejak awal tahun 2010-an, dan COVID-19 telah mempercepat pembalikan tersebut.⁵ Pada tahun 1990-an dan 2000-an, Asia Tenggara mengalami demokratisasi ekstensif, dan pada awal tahun 2010-an, berbagai negara termasuk Timor Leste, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, dan bahkan Kamboja dan Myanmar telah membuat kemajuan politik yang substansial. Namun, kemajuan ini tersendat. Meskipun dipimpin oleh pemerintah sipil dan relatif demokratis selama sebagian besar tahun 1990-an dan 2000-an, Thailand mengalami kudeta militer pada tahun 2014.⁶ Junta militer, ketika pada akhirnya mengizinkan pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019, menciptakan lingkungan pemilihan umum yang tidak adil: junta militer menggunakan perubahan konstitusi dan manuver lain untuk memungkinkan partai pro-militer, Palang Pracharat, untuk memenangkan pemilihan umum tahun 2019.⁷ Ketika partai oposisi, Partai Masa Depan Maju (Future Forward Party), tampil baik dalam pemilihan umum dan terus menarik dukungan populer yang cukup besar setelah pemungutan suara, Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan partai itu.⁸ Di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte yang terpilih untuk masa jabatan enam tahun pada tahun 2016 telah mengawasi “perang” narkoba berdarah yang mengakibatkan ribuan pembunuhan di luar proses hukum; Rodrigo Duterte telah memenjarakan lawan politik dan jurnalis serta merongrong independensi Mahkamah Agung dan lembaga lainnya.⁹ Secara keseluruhan, pada akhir tahun 2010-an, tujuh dari sebelas negara Asia Tenggara menjadi kurang bebas dibandingkan satu dekade sebelumnya.¹⁰ Pengecualiannya adalah negara kecil Timor Leste dan Singapura; Myanmar yang nyaris menjadi kurang bebas dibandingkan kondisi yang dialaminya selama beberapa dekade pemerintahan militer yang brutal; dan Malaysia yang melakukan pemindahan kekuasaan nyata pertamanya setelah kemenangan pihak oposisi pada tahun 2018.

Di Asia Selatan, juga berbagai negara telah mengalami kemunduran demokrasi selama dekade terakhir ini, meskipun masih terdapat pengecualian seperti Bhutan. Pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi telah menyerang kebebasan pers, mencabut otonomi Jammu dan Kashmir dan meningkatkan represi di wilayah tersebut, serta menggunakan berbagai langkah hukum dan keuangan yang dipertanyakan untuk menghambat lawan politik.¹¹ Di Jammu dan Kashmir, pemerintah telah melakukan penahanan preventif terhadap sejumlah politisi dan pemimpin Kashmir lainnya tanpa mengajukan tuntutan apa pun terhadap mereka, dalam tindakan yang tampaknya melanggar perlindungan dalam konstitusi India.¹² Pemerintahan Modi semakin merongrong lembaga independen seperti Bank Sentral India (Reserve Bank of India), kantor ombudsman antikorupsi, dan Mahkamah Agung. Di Sri Lanka, keluarga Rajapaksa sekarang mengontrol parlemen, kepresidenan, dan militer serta menerapkan mayoritarianisme populis yang semakin tidak liberal—menghancurkan hak-hak minoritas Muslim dan Tamil.¹³ Setelah pemilu presiden pada tahun 2019 dan pemilu parlemen pada tahun 2020 yang mengembalikan keluarga Rajapaksa ke tampuk kekuasaan setelah lima tahun—mereka juga telah memerintah Sri Lanka antara tahun 2005 hingga 2015, keluarga Rajapaksa bergerak cepat untuk mengikis pengawasan terhadap kekuasaan mereka dan mengurangi perlindungan bagi minoritas.¹⁴ Tidak lama setelah memenangkan mayoritas dua pertiga parlemen dalam pemilu, pemerintah Rajapaksa mengeluarkan rancangan undang-undang untuk mencabut

amandemen konstitusi kesembilan belas—amandemen tersebut telah membatasi kekuasaan kepresidenan—sehingga memberi presiden kekuasaan baru yang ekstensif.¹⁵

Di Bangladesh, Perdana Menteri Sheikh Hasina dan partai Liga Awami-nya telah mengubah demokrasi yang dulunya relatif kuat menjadi negara satu partai *de facto*, ketika para pemimpin oposisi dipenjara dan dilecehkan serta media diancam dan diintimidasi agar mengikuti keinginan pemerintah.¹⁶ Di Nepal, pemerintah semakin berupaya membatasi kebebasan berbicara secara *online* dan mengambil langkah lain untuk membatasi kebebasan sipil.¹⁷

FAKTOR DOMESTIK YANG MENDORONG KEMUNDURAN

Berbagai kekuatan mendorong kemunduran demokrasi di Asia Selatan dan Tenggara. Di Kamboja, Myanmar, dan Nepal yang memiliki sejarah panjang otoritarianisme dan konflik sipil, lembaga dan norma demokrasi tetap rapuh bahkan pada awal tahun 2010-an. Lembaga-lembaga yang tidak pernah terbangun sepenuhnya ini mudah sekali diruntuhkan.¹⁸ Di beberapa negara lain di kawasan ini, angkatan bersenjata tidak pernah sepenuhnya mundur ke barak bahkan pada tahun 1990-an dan 2000-an. Sebaliknya, militer ini terus campur tangan dalam dunia politik. Meskipun Thailand merupakan contoh intervensi militer yang paling mengerikan—*kudeta* tahun 2014 merupakan *kudeta* atau upaya *kudeta* kedua puluh dua di kerajaan itu dalam satu abad, Indonesia, Maladewa, Myanmar, Pakistan, dan Filipina juga terus mengalami intervensi militer dalam dunia politik.¹⁹

Sepanjang tahun 2010-an di India, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, dan Thailand, kalangan pekerja dan kelas menengah ke bawah juga semakin tidak puas dengan partai politik dan politisi tradisional yang sering kali berasal dari latar belakang elite dan yang tidak meningkatkan pelayanan sosial secara signifikan atau mendorong kesetaraan ekonomi yang lebih luas.²⁰ Para pemilih ini semakin tertarik pada para pemimpin populis yang karismatik tetapi tidak liberal, seperti mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, Modi, Duterte, dan keluarga Rajapaksa. Orang-orang ini—dan mereka semua berjenis kelamin laki-laki—menjanjikan jenis pemerintahan yang keras, mengklaim bahwa tangan besi diperlukan untuk menghancurkan monopoli kekuasaan politik kelompok elite, melawan ketidaksetaraan, meningkatkan pelayanan, memerangi kejahatan, dan memastikan kemenangan aspirasi kelompok mayoritas dalam dunia politik dan masyarakat.²¹ (Tidak semua pemimpin yang tidak liberal di kawasan itu bersifat populis, tetapi banyak dari mereka saat ini merupakan pemimpin populis.) Akan tetapi, banyak dari pemimpin populis yang tidak liberal ini—yang menggambarkan diri mereka sebagai pihak luar dalam kancah politik—merupakan bagian dari kelompok elite itu sendiri dan kebijakan mereka dapat menimbulkan kerugian signifikan pada masyarakat kelas bawah: Thaksin merupakan miliuner dan konglomerat di bidang telekomunikasi, dan Duterte berasal dari keluarga politik elite. Sementara itu, Duterte mendapatkan sebagian besar dukungan terkuatnya dari pemilih kelas menengah dan menengah ke bawah, meskipun apa yang disebutnya sebagai “perang” narkoba telah menimbulkan korban yang sangat besar pada masyarakat miskin dan kelas menengah ke bawah.²²

Banyak populis yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara juga telah memanfaatkan sektarianisme yang meningkat, polarisasi, dan ledakan media sosial di kawasan itu untuk mendukung basis politik mereka dan menjelek-jelekkan etnis, agama, dan kelompok minoritas lainnya—menyalahkan mereka atas masalah sosial yang telah mengakar di sana.²³ Pertumbuhan eksponensial pengguna media sosial di Asia Selatan dan Tenggara, di mana pembatasan hukum terhadap misinformasi dan disinformasi *online* lemah, telah memungkinkan pemimpin seperti Duterte, Modi,

dan keluarga Rajapaksa menggunakan *platform* media sosial untuk menyebarkan teori konspirasi; melancarkan serangan ganas terhadap saingan politik, hakim, jurnalis, dan kelompok minoritas; serta menggembleng pendukung, terutama dengan retorika kebencian tentang kelompok minoritas—umat Kristen di Indonesia, pengguna narkoba kelas bawah di Filipina, dan umat Muslim di India, Myanmar, Sri Lanka, dan Thailand.²⁴ Beberapa pemimpin Asia Selatan dan Tenggara tidak menggunakan media sosial untuk melancarkan serangan itu sendiri, seperti yang dilakukan oleh Presiden A.S. Donald J. Trump. Sebaliknya, pemimpin seperti Modi memungkinkan penyebaran aktivitas *online* yang tidak terkendali yang dilakukan oleh para aktor yang mendukung partai yang berkuasa, dan para aktor ini melancarkan serangan, menggembleng pendukung, dan menyebarkan retorika kebencian.²⁵

Dalam dua dekade terakhir, sebagian besar Asia Selatan dan Tenggara juga telah mengalami polarisasi politik yang lebih besar di seputar masalah regional, etnis, dan agama.²⁶ Sekarang, di banyak negara Asia Selatan dan Tenggara, pendukung kuat semakin menghindari kompromi yang diperlukan agar demokrasi berfungsi dan memperlakukan setiap pemilu sebagai peristiwa hidup atau mati.²⁷ Meningkatnya polarisasi mengurangi potensi terjadinya kompromi yang penting dalam membuat demokrasi berjalan.

FAKTOR INTERNASIONAL YANG MENDORONG KEMUNDURAN

Sementara itu, kekuatan demokrasi global yang, antara tahun 1990-an dan pertengahan tahun 2010-an, telah mengkritik pemimpin Asia Selatan dan Tenggara karena merongrong demokrasi sebagian besar tetap diam dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pertengahan tahun 2010-an, negara-negara demokrasi terkemuka seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang menjadi kurang berfokus pada upaya untuk mempromosikan demokrasi, baik di Asia maupun secara global, ketika publik mereka menjadi kurang internasionalis, ketika negara-negara kaya ini telah memilih pemimpin yang tidak tertarik untuk mempromosikan demokrasi, dan ketika negara-negara demokrasi terkemuka ini sendiri menjadi kurang demokratis.²⁸

Pendekatan pemerintahan Trump terhadap kawasan Indo-Pasifik, konsep Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka, secara teoretis mendukung promosi kebebasan di seluruh Asia Selatan dan Tenggara.²⁹ Dengan beberapa pengecualian seperti mendorong dengan keras demokrasi di Kamboja, Gedung Putih sebagian besar telah melepaskan tanggung jawab pada upaya untuk mempromosikan demokrasi internasional. Pemerintahan Trump berulang kali mencoba memangkas anggaran untuk upaya promosi demokrasi meskipun Kongres biasanya memulihkan dana tersebut.³⁰ Presiden itu sendiri telah membangun hubungan dekat dengan serangkaian pemimpin otoriter termasuk Recep Tayyip Erdogan dari Turki, Vladimir Putin dari Rusia, dan Abdel Fatah al-Sisi dari Mesir, serta menurunkan aliansi dengan negara-negara demokrasi seperti Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan memiliki hubungan yang buruk dengan banyak pemimpin negara demokrasi seperti Angela Merkel dari Jerman dan Justin Trudeau dari Kanada.³¹ Di Asia Tenggara, Presiden Trump secara terbuka memuji “perang” berdarah dan di luar proses hukum pemerintahan Duterte terhadap narkoba.³²

Negara demokrasi terkemuka lainnya juga menjadi kurang berfokus pada upaya untuk mempromosikan demokrasi, dan pandemi COVID-19 semakin menggeser prioritas mereka ke domestik. Pada tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, misalnya, Jepang merupakan pendukung kuat politik yang lebih bebas di berbagai negara di kawasan itu seperti Kamboja. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang yang berfokus pada memerangi pengaruh strategis regional Tiongkok kurang

memperhatikan kemunduran demokrasi di negara-negara yang secara strategis vital bagi Tokyo seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Dan secara keseluruhan, seperti yang dicatat Larry Diamond dari Stanford University dalam sebuah studi baru di jurnal *Democratization*, sebagian besar negara demokrasi terbesar yang termasuk dalam Kelompok 20 (G20) telah mengalami kemunduran demokrasi mereka sendiri dalam lima belas tahun terakhir. Dengan kemunduran demokrasi mereka sendiri, mereka sering kali menjadi contoh yang tidak memadai bagi negara-negara berkembang dan jauh kurang berfokus untuk mendukung demokrasi di luar negeri.³³

Ketika negara demokrasi terkemuka telah lebih memprioritaskan masalah domestik dan menjadi kurang demokratis, kekuatan otoriter Tiongkok dan Rusia menjadi lebih aktif di panggung global. Tiongkok telah mendukung pemimpin yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara, sering kali turun tangan untuk memberikan bantuan ketika negara demokrasi mengkritik atau mengucilkan pemimpin yang tidak liberal. Saat militer Thailand menggulingkan pemerintahan terpilih pada tahun 2014, pemerintahan Barack Obama secara retorik mengkritik Bangkok dan menjatuhkan sanksi kepada pemerintah hasil kudeta. Tiongkok segera mendekati pemerintah hasil kudeta, menunjukkan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan retorika, militer, serta ekonomi—dan menopang junta militer.³⁴ Demikian pula ketika negara-negara demokrasi terkemuka menarik pendanaan dan pemantau dari pemilihan umum di Kamboja pada pertengahan tahun 2018 karena pemilihan umum itu terlihat tidak berjalan secara bebas dan adil, Tiongkok turun tangan. Tiongkok mengumumkan serangkaian pinjaman lunak dan proyek infrastruktur baru, yang waktunya disesuaikan dengan masa kampanye Hun Sen, dan juga menyediakan pendanaan pemilu.³⁵ Hun Sen memenangkan pemilu palsu itu dan terus menindak tegas politisi oposisi dan masyarakat sipil sejak saat itu.

Mempercepat Kemunduran Demokrasi: Faktor Terkait COVID

Meskipun Asia Selatan dan Tenggara sudah mengalami kemunduran demokrasi, pandemi telah mempercepat penurunan tersebut. Kemunduran era COVID bahkan lebih menonjol karena wabah itu terjadi di negara demokrasi mapan seperti India dan Indonesia dan karena Asia Selatan dan Asia Tenggara telah menjadi dua wilayah paling bebas di kalangan negara-negara berkembang pada tahun 1990-an dan 2000-an. Pemimpin regional memanfaatkan pandemi untuk menekan kebebasan dengan beberapa cara.

PEMIMPIN MENGGUNAKAN COVID-19 UNTUK MEMPERLUAS OTORITAS MEREKA MELALUI LEGISLASI

Pemimpin politik di seluruh kawasan itu telah menggunakan ancaman virus sebagai kesempatan untuk memberlakukan undang-undang baru, dan terkadang menerbitkan perintah eksekutif, yang memperluas kewenangan mereka tanpa batas waktu yang jelas, mengurangi pemeriksaan birokrasi terhadap pemerintah, dan bahkan memberlakukan versi darurat militer. Pemerintah Thailand telah mengambil kekuasaan darurat yang memungkinkan pihak berwenang menangkap masyarakat hanya karena membuat pernyataan tentang COVID-19 yang bisa “memicu rasa takut” atau “menyesatkan publik.”³⁶ Semua kategori ini begitu luas sehingga bisa mencakup hampir semua kritik terhadap Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha atau pejabat tinggi pemerintah lainnya. Di Filipina, Duterte tidak hanya memberlakukan karantina wilayah (*lockdown*) yang keras dan tidak terencana dengan baik, tetapi juga mengambil kekuasaan darurat yang ekspansif, yang diberikan kepadanya oleh badan legislatif yang mematuhi perintahnya.³⁷ Kekuasaan darurat itu mencakup kemampuan untuk melakukan penangkapan tanpa adanya surat perintah terhadap siapa pun yang diklaim “mencurigakan” oleh dewan yang ditunjuk pemerintah. Badan legislatif Filipina telah memperpanjang kekuasaan darurat Duterte, dan batasan waktunya pun sama sekali masih belum jelas.

Sampai saat ini, penolakan regional dari politisi oposisi dan masyarakat sipil terhadap perundang-undangan dan tindakan eksekutif terkait pandemi yang dapat semakin merusak demokrasi masih terbatas. Penolakan ini telah sebagian dibatasi oleh pembatasan pertemuan yang telah menghilangkan ruang untuk unjuk rasa publik, dan badan legislatif yang nyaris tidak berfungsi. Karantina wilayah secara keras yang dilakukan oleh Duterte di Filipina, misalnya, telah mencegah tanggapan publik yang signifikan atas perebutan kekuasaan yang dilakukannya. Begitu pula dengan tanggapan kejam India terhadap pandemi telah membatasi oposisi terhadap tindakan Modi.³⁸ Karantina wilayah yang diberlakukan dengan cepat oleh Modipada bulan Maret, ketika masyarakat dilarang meninggalkan rumah mereka selama tiga minggu, menyebabkan kepanikan di antara banyak warga India. Jutaan orang bergegas melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman mereka di berbagai penjuru negara itu sebelum pembatasan itu diberlakukan; setelah karantina wilayah diberlakukan, polisi menangkap dan menganiaya orang-orang yang tidak berada di rumah mereka.³⁹ Karena sedang berada dalam perjalanan, takut kehilangan kebutuhan dasar dan tanpa akses ke program jaring pengaman dasar seperti jatah makanan, dan menghadapi pemerintah yang semakin tidak toleran, hanya sedikit dari

warga India yang terkena dampak ini yang memiliki waktu atau kemampuan untuk melawan kebijakan Modi. Meskipun para pekerja migran yang marah telah mengadakan demonstrasi sporadis menentang kerasnya kebijakan karantina wilayah, protes tersebut belum berkembang menjadi gerakan yang lebih besar.⁴⁰

Lebih dari itu, masyarakat yang takut akan virus Corona, terkadang menginginkan tindakan pembatasan yang kuat, pada awalnya cenderung mendukung pemimpin mereka. Masyarakat bersedia, karena alasan kesehatan masyarakat, untuk menoleransi pengawasan dan pembatasan terhadap kebebasan berkumpul yang lebih besar.⁴¹ Bahkan negara demokrasi maju seperti Korea Selatan telah menggunakan pelacakan ponsel untuk pelacakan kontak, dan negara-negara kaya seperti Selandia Baru telah menerapkan penutupan akses menyeluruh yang ketat, meskipun dengan batas waktu dan tanpa mencabut kebebasan berbicara dan hak-hak lainnya.⁴² Ketakutan akan virus juga dapat menumbuhkan keinginan publik akan pemerintahan yang kuat, bahkan autokrasi, terutama di tempat-tempat yang penduduknya percaya bahwa demokrasi yang baru lahir tidak membantu meningkatkan standar hidup atau memerangi korupsi dan tidak efektif dalam menanggapi COVID-19. Di Indonesia, misalnya, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menemukan penurunan dukungan publik terhadap demokrasi tahun ini, penurunan yang sebagian disebabkan oleh sentimen publik bahwa pemimpin yang dipilih secara demokratis di Indonesia telah menangani tanggapan pandemi dengan buruk.⁴³

PEMIMPIN MEMINGGIRKAN OPOSISI DAN MENINGKATKAN KONTROL TERHADAP BADAN LEGISLATIF

Pemimpin di rezim hibrida dan negara demokrasi paling kuat di Asia Selatan dan Tenggara juga termasuk di antara pemimpin yang paling agresif di dunia dalam menggunakan COVID-19 untuk meminggirkan partai politik oposisi dan masyarakat sipil serta memusatkan kendali politik di dalam badan legislatif dan struktur pemerintahan lainnya.

Di Malaysia, setelah pertikaian dalam koalisi yang berkuasa yang pada tahun 2018 berhasil mengalahkan partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (United Malays National Organization - UMNO) yang telah lama mendominasi kekuasaan, Yang Dipertuan Agung Malaysia pada Maret lalu mencalonkan perdana menteri baru, Muhyiddin Yassin. Muhyiddin membentuk pemerintahan terutama dengan dukungan dari UMNO.⁴⁴ Pemerintahan Muhyiddin yang memegang mayoritas tipis di badan legislatif telah berulang kali mencegah pelaksanaan sidang parlemen dengan alasan pandemi. Pertemuan parlemen yang tidak teratur itu telah membatasi *platform* publik yang paling terlihat dari para pemimpin oposisi. Membatasi parlemen juga mencegah dilaksanakannya pemungutan suara untuk mosi tidak percaya dan pembelotan dari koalisi Muhyiddin.⁴⁵ Pemerintah juga telah mencabut tuntutan pidana terhadap sejumlah tokoh UMNO yang diduga terkait dengan skandal keuangan masif 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan menempatkan banyak sekutu UMNO di posisi kepemimpinan berbagai badan usaha milik negara. (Mantan perdana menteri dan pendukung UMNO Najib Razak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman hingga dua belas tahun penjara karena perannya dalam skandal 1MDB.⁴⁶) Ketika pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mencoba untuk menentang pemerintah Muhyiddin, mengatakan bahwa dia dan bukan perdana menteri sekarang yang mendapatkan dukungan mayoritas di majelis rendah parlemen, Yang Dipertuan Agung Malaysia mungkin menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan kekuasaan Muhyiddin dengan menolak untuk mendukung upaya Anwar.⁴⁷

Di Asia Selatan, pemerintah juga telah menindak tegas pihak oposisi dan memperkuat kendali mereka terhadap badan legislatif. Pemerintah Bangladesh telah menahan lawan politik dan pemimpin masyarakat sipil yang telah mengkritik tanggapan pandemi Dhaka, sering kali menggunakan Undang-Undang Keamanan Digital yang keras, yang memberi pihak berwenang kekuasaan luas untuk menangkap orang yang membuat pernyataan secara *online*.⁴⁸ Berdasarkan undang-undang itu, siapa pun di Bangladesh dapat ditangkap karena unggahan yang terkait dengan “pandemi virus Corona yang berdampak negatif pada citra negara” atau unggahan yang “menyebabkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat memburuk,” kategori yang dapat mencakup berbagai macam komentar dan liputan berita.⁴⁹ Di Pakistan, pemerintah telah menindak tegas perbedaan pendapat dan memberikan kendali ekstensif kepada militer atas tanggapan pandemi.⁵⁰ Pemerintah Sri Lanka telah menggunakan intelijen militer untuk mengumpulkan data dari banyak warga Sri Lanka—yang tampaknya juga merupakan sarana intimidasi—dan meningkatkan pembatasan terhadap oposisi politik.⁵¹ Dan pemerintah Modi dalam beberapa bulan terakhir menangkap banyak aktivis oposisi, beberapa di antaranya pada awal tahun 2020 memimpin protes terhadap undang-undang kewarganegaraan baru yang mereka anggap mendiskriminasi Muslim.⁵² Aktivis oposisi, banyak di antaranya telah ditangkap karena melanggar undang-undang penghasutan dan anti-terorisme, mengklaim bahwa mereka memiliki sedikit akses ke penasihat hukum atau kemampuan untuk menggugat pembatasan yang diberlakukan karena alasan pandemi COVID-19 begitu pihak berwenang menahan mereka.⁵³

Bahkan di Indonesia, negara demokrasi paling terkonsolidasi di Asia Tenggara, pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, telah mengarah ke autokrasi selama berjangkitnya pandemi, sebagian dengan membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Ketika Jokowi berjuang keras untuk mengatasi krisis dan berselisih dengan gubernur provinsi, pemerintah pusat telah memberlakukan pembatasan baru yang ekstensif pada kebebasan berbicara.⁵⁴ Polri, misalnya, telah menerapkan prosedur baru yang memungkinkan mereka mengajukan tuntutan terhadap orang-orang yang mengkritik tanggapan COVID-19 yang dilakukan oleh presiden atau pejabat pemerintah lainnya. Polri telah menangkap banyak kritikus, termasuk beberapa aktivis terkemuka.⁵⁵

PEMIMPIN MENGGUNAKAN DISINFORMASI DI ERA COVID-19 UNTUK MENYEMBUNYIKAN KEGAGALAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN MEMUSATKAN KEKUASAAN

Banyak pemimpin regional juga telah menyebarkan disinformasi tentang COVID-19 untuk mengaburkan kegagalan mereka dalam membendung pandemi dan memperkuat kekuasaan mereka. Di India, misalnya, pemerintahan Perdana Menteri Modi, yang telah memicu perpecahan budaya dan agama sejak pertama kali dilantik pada tahun 2014 telah memanfaatkan pandemi tersebut untuk lebih memicu perselisihan, sebagian dengan menyebarkan kebohongan tentang kelompok minoritas.⁵⁶ Pejabat tinggi Partai Bharatiya Janata (Bharatiya Janata Party - BJP) yang berkuasa telah berulang kali mengambinghitamkan Muslim, Dalit, dan minoritas lainnya sebagai penyebar COVID-19 meskipun tidak ada bukti ilmiah untuk mendukung klaim ini.⁵⁷ (Yang pasti, gerakan dakwah Jemaat Tabligh mengadakan pertemuan besar di Delhi pada awal pandemi, dan pertemuan itu menjadi acara penyebar super awal, tetapi pejabat BJP dan media kemudian mulai mengambinghitamkan semua Muslim sebagai penyebar virus.⁵⁸)

Stigmatisasi melalui disinformasi ini, dan iklim yang sudah beracun bagi minoritas di bawah pemerintahan Modi, telah menyebabkan lonjakan kekerasan terhadap Muslim sejak pandemi

melanda.⁵⁹ Stigmatisasi ini juga telah memberi pemerintahan Modi kesempatan untuk menindak tegas aktivis masyarakat sipil Muslim sehingga mengakibatkan dilaporkannya ribuan penangkapan dengan kedok mengendalikan wabah.⁶⁰

Negara-negara autokrasi terkemuka di luar Asia Selatan dan Tenggara telah mendukung disinformasi ini. Dalam beberapa bulan terakhir, Beijing telah meningkatkan penggunaan informasi dan disinformasinya untuk menyerang kebijakan COVID-19 yang dilakukan oleh negara-negara demokrasi dan mempromosikan pendekatannya sendiri terhadap virus itu.⁶¹ Klaim bahwa negara otoriter telah bekerja dengan lebih baik dalam menangani COVID-19 tidak benar adanya: Tidak ada studi sistemis yang menunjukkan bahwa autokrasi memiliki kaitan dengan pengendalian pandemi. Tiongkok, Thailand, dan Vietnam, tiga negara yang sangat represif di Asia Timur, telah mengembangkan kebijakan pandemi yang sangat efektif. Vietnam, sebuah negara berpenghasilan menengah ke bawah dengan populasi hampir sembilan puluh lima juta jiwa dan kota-kota yang padat penduduknya, telah mengalami sekitar 1.100 kasus dan 35 kematian yang dilaporkan.⁶² Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 kali populasi Vietnam, memiliki sekitar 7,7 juta kasus dan sekitar 214.000 kematian.⁶³ Namun, banyak negara autokrasi, termasuk Iran dan Rusia, gagal membendung COVID-19.⁶⁴ Sementara itu, negara-negara demokrasi seperti Jerman, Selandia Baru, dan Korea Selatan berhasil memerangi virus tersebut.⁶⁵

Konteks Global

Kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi di Asia Selatan dan Tenggara meskipun kawasan tersebut telah jatuh dari tingkat demokrasi yang lebih tinggi daripada beberapa kawasan berkembang lainnya. COVID-19 telah menjadi keuntungan bagi banyak, meskipun tidak semua, politisi yang tidak liberal di seluruh dunia. Studi Freedom House baru-baru ini menunjukkan bahwa kondisi demokrasi dan hak asasi manusia telah memburuk di delapan puluh negara sejak pandemi dimulai.⁶⁶ Yang pasti, tidak semua pemimpin yang tidak liberal memanfaatkan COVID-19 untuk mengumpulkan lebih banyak kekuasaan.⁶⁷ Meski demikian, banyak yang sudah melakukannya. Presiden Venezuela Nicolás Maduro memenjarakan jurnalis, aktivis, dan petugas kesehatan karena mempertanyakan pendekatan Maduro terhadap virus Corona—dan mempertanyakan kebijakan pemerintah secara umum.⁶⁸ Pemerintah El Salvador yang menggunakan COVID-19 sebagai alasan telah mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ilegal bagi pemerintah untuk menyita properti orang-orang yang dituduh tidak mematuhi karantina; Pemerintah El Salvador juga telah menggunakan kepolisian untuk melakukan penahanan yang meluas.⁶⁹

Di Eropa Timur dan negara-negara bekas Soviet lainnya, ceritanya pun serupa. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán telah diberi kekuasaan darurat yang ekstensif oleh parlemen yang mematuhi perintahnya. Meskipun hukum yang memberinya kekuasaan ini ditarik pada bulan Juni, dia terus menggunakan kekuasaan yang pada dasarnya sama, hampir tak terbatas.⁷⁰ Sebagian karena tindakan tegas terkait COVID-19 di negara bekas Soviet dan negara tetangga mereka, laporan tahunan terbaru Freedom House tentang demokrasi di bekas Uni Soviet menemukan lebih sedikit negara demokrasi di seluruh kawasan itu semenjak tahun 1995.⁷¹

Di Timur Tengah dan sub-Sahara Afrika juga, pemerintah telah menggunakan pandemi untuk membatasi kebebasan. Pemerintah Aljazair telah menangkap dan menggunakan kekerasan brutal terhadap banyak aktivis anti-pemerintah dengan kedok menghentikan penyebaran pandemi.⁷² Turki, sementara itu, telah menahan ratusan orang karena diduga menulis unggahan “provokatif” tentang pandemi secara *online*.⁷³ Di Mesir, negara paling represif di Afrika Utara, pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi telah menggunakan pandemi sebagai kesempatan untuk mengamendemen undang-undang darurat dan memberi presiden serta angkatan bersenjata kendali yang lebih ketat atas masyarakat Mesir.⁷⁴ Di sub-Sahara Afrika, pemerintah Zimbabwe telah menggunakan ancaman COVID-19 untuk meningkatkan penahanan terhadap politisi dan aktivis oposisi.⁷⁵

IMPLIKASI JANGKA PANJANG

Tindakan yang diambil, dalam teori, untuk memerangi COVID-19 dapat bertahan lama bahkan setelah pandemi berakhir. Sejarah menunjukkan bahwa undang-undang yang diberlakukan dan tindakan eksekutif yang diambil sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat nasional jarang dicabut, bahkan ketika keadaan darurat tersebut surut. Terkadang, undang-undang dan tindakan eksekutif era krisis dipertahankan. Di lain waktu, undang-undang dan tindakan eksekutif ini digunakan kembali agar sesuai dengan tujuan kebijakan lain sembari tetap membantu pemerintah

mempertahankan kekuasaan yang cukup besar. Di Amerika Serikat, negara demokrasi yang lebih terkonsolidasi daripada negara-negara di Asia Selatan atau Tenggara, Undang-Undang Patriot yang disahkan setelah 9/11 pada dasarnya masih berlaku hampir dua dekade kemudian meskipun ada kritik bahwa undang-undang tersebut telah melampaui kegunaannya, memungkinkan penegakan hukum memiliki kewenangan pengawasan yang terlalu luas, dan telah digunakan dengan cara yang tidak dibayangkan oleh perancangannya pada tahun 2001.⁷⁶

Di Asia Selatan dan Tenggara, undang-undang dan tindakan eksekutif yang diterapkan di era COVID-19 dapat memiliki nasib yang sama dengan Undang-Undang Patriot. Beberapa pembuat kebijakan dan pemimpin masyarakat sipil Filipina dari pihak oposisi, misalnya, percaya bahwa Duterte, yang telah memperpanjang kekuasaan daruratnya hingga tahun 2021, dapat mempertahankan kekuasaan daruratnya hingga tahun 2022, ketika masa jabatannya berakhir. Dia dapat menggunakan kekuasaan ini untuk membantu penerus favoritnya memenangkan pemilihan presiden berikutnya dan kemudian melanjutkan kebijakan orang kuat gaya Duterte.⁷⁷ (Seorang presiden Filipina dibatasi untuk satu masa jabatan selama enam tahun.) Di Kamboja, India, Thailand, dan negara-negara lain di kawasan ini, pemerintah telah memperpanjang kekuasaan darurat yang diberlakukan pada awal pandemi. Pemimpin di negara-negara ini akan menghadapi godaan besar-besaran untuk mempertahankan kekuasaan ini bahkan setelah pandemi terkendali.

KEKUASAAN POLITIK, KEGAGALAN KESEHATAN MASYARAKAT

Banyak dari pemimpin yang tidak liberal ini menjadi lebih kuat bahkan ketika mereka gagal dalam menangani kesehatan masyarakat. Banyak pemimpin, baik di kawasan ini maupun secara global, yang salah menangani pandemi merupakan pemimpin populis yang tidak liberal, yang tidak menyukai saran dari para pakar kesehatan dan menerapkan gaya pemerintahan yang kacau dan improvisasi. Peremehan terhadap saran dari para pakar kesehatan dan koordinasi kebijakan yang buruk, bahkan dalam situasi umum, telah menghambat pemimpin tersebut dalam menangani COVID-19. (Sebaliknya, beberapa negara otoriter yang tidak dipimpin oleh pemimpin populis, seperti Vietnam, telah mampu melaksanakan kebijakan COVID-19 yang koheren, terkoordinasi, dan efektif.⁷⁸)

Tidak semua pemimpin populis meremehkan atau salah menangani COVID-19: sebuah studi baru-baru ini oleh Tony Blair Institute for Global Change menemukan bahwa mayoritas pemimpin populis telah menanggapi pandemi dengan serius.⁷⁹ Akan tetapi, studi tersebut juga menemukan bahwa pemimpin populis dari beberapa negara demokrasi terbesar belum menanggapi pandemi dengan cukup serius, dan bahkan pemimpin populis yang menangani pandemi secara serius telah merusak demokrasi saat mereka menjalankan kebijakan kesehatan masyarakat yang relatif efektif.⁸⁰ Di Brasil, misalnya, Presiden Jair Bolsonaro yang sangat membenci saran dari para pakar kesehatan sudah lama membantah bahwa virus Corona adalah ancaman nyata, salah menangani hubungan federal-negara bagian dalam memerangi COVID-19, dan mempromosikan teori konspirasi, bahkan ketika dia sendiri terpapar COVID-19.⁸¹ Di bawah kepemimpinan kacau Bolsonaro, Brasil telah mengalami salah satu wabah terburuk di dunia.⁸² Di Amerika Serikat, kesalahan manajemen pemerintahan Trump terhadap COVID-19 juga sebagian berasal dari pengabaian presiden terhadap saran dari para pakar kesehatan, merongrong birokrasi federal, dan gaya pemerintahan improvisasi.⁸³ Akibatnya, Amerika Serikat sejauh ini mengalami kematian terbanyak akibat

COVID-19 dibandingkan negara mana pun di dunia, dan virus itu telah menyebar hingga ke Gedung Putih.⁸⁴

Di Asia Selatan dan Tenggara, banyak pemimpin populis yang tidak liberal telah berjuang keras untuk membendung virus, namun tata kelola yang buruk ini tidak menghentikan mereka untuk memperluas lebih banyak kekuasaan. Kebijakan karantina wilayah milik Modi yang memberi penduduk dan pemimpin provinsi sedikit waktu untuk mempersiapkan diri dan diberlakukan ketika pemerintah nasional mengupayakan sedikit usaha untuk menciptakan jaring pengaman telah menjadi bencana.⁸⁵ Karantina wilayah yang direncanakan dengan buruk tidak meratakan kurva beban kasus COVID-19 India.⁸⁶ Namun, malah menimbulkan kekacauan sosial dan merusak perekonomian, yang menyusut sekitar 24 persen pada kuartal kedua tahun ini, bahkan ketika pemerintahan Modi memperluas kekuasaan.⁸⁷ (Akan tetapi, beberapa negara bagian India seperti Kerala telah menangani penutupan akses menyeluruh secara efektif, mengirimkan makanan ke rumah-rumah masyarakat dan besar kemungkinan mengurangi kemarahan publik dalam proses tersebut.) Di Filipina, pendekatan Duterte terhadap COVID-19 kurang menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat dan telah merusak perekonomian secara parah, sementara itu virus masih belum terkendali. Duterte terlalu lama meremehkan ancaman virus, mengatakan kepada publik dalam pidato nasional pada bulan Maret bahwa merupakan tindakan bodoh untuk takut pada COVID-19 dan terlihat di depan umum menentang pedoman tentang pembatasan jarak sosial, sampai dia tiba-tiba berbalik arah dan menerapkan karantina wilayah secara ekstensif. Bahkan sekarang, dia gagal memberikan arahan yang konsisten atau mendukung ahli kesehatan masyarakat yang dapat menyampaikan pesan publik yang konsisten, sembari memperluas kekuasaan melalui tindakan darurat dan upaya lainnya.⁸⁸

Meskipun pandemi telah memungkinkan pemimpin Asia Selatan dan Tenggara menjadi lebih autokrasi dalam jangka pendek, kegagalan dalam jangka lebih panjang mereka untuk menangani COVID-19 secara memadai dapat memberi lawan politik mereka peluang untuk menantang mereka dan melepaskan konsentrasi kekuasaan mereka. Memang, kegagalan pemerintah mereka dapat membuat mereka lebih rentan terhadap tantangan dari oposisi politik, melemahkan kemampuan mereka untuk memusatkan kekuasaan, dan pada akhirnya membuat pemulihan lembaga dan norma demokrasi menjadi lebih mudah. Di seluruh dunia, pemimpin seperti Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dan Kanselir Jerman Angela Merkel yang telah mengawasi tanggapan efektif terhadap COVID-19 telah melihat popularitas mereka meroket, dengan Ardern baru-baru ini meraih kemenangan pemilu terbesar dalam sejarah modern Selandia Baru.⁸⁹ Sebaliknya, di negara-negara dengan efek pandemi yang parah pada kesehatan masyarakat dan perekonomian, citra publik dan popularitas pemimpin sering kali menurun.

Langkah ke Depan

Bahkan di negara maju, pakar kesehatan masyarakat memperkirakan bahwa pandemi tidak akan dibendung secara efektif dan kehidupan tidak akan kembali normal hingga akhir tahun 2021.⁹⁰ Di Asia Selatan dan Tenggara, tempat vaksinasi massal bisa menjadi tantangan logistik, kembali ke keadaan normal bisa memakan waktu lebih lama. Pada tahun-tahun berikutnya, pemimpin yang tidak liberal dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat kekuasaan mereka dan melumpuhkan semua oposisi, menggerakkan negara mereka lebih dekat ke pemerintahan otoriter murni—hasil yang telah dicapai di beberapa rezim hibrida regional sebelumnya seperti Kamboja.⁹¹

Oleh karena itu, penting bahwa pembela norma dan lembaga demokrasi bertindak cepat guna mencegah para pemimpin menggunakan pandemi untuk memperkuat kekuasaan mereka dan merusak demokrasi serta untuk memastikan bahwa pemerintah dapat melindungi kesehatan dan kebebasan publik pada saat yang bersamaan. Untuk kekuatan demokrasi terkemuka termasuk Amerika Serikat, mengambil langkah-langkah ini juga demi kepentingan mereka sendiri. Memang, pemimpin yang tidak liberal seperti Duterte, keluarga Rajapaksa, dan bahkan Jokowi, dengan gaya pemerintahan yang improvisasi dan lincah, sering kali terbukti menjadi mitra yang tidak stabil. Dalam empat tahun masa jabatannya, misalnya, presiden Filipina telah berubah arah di antara mengutuk Amerika Serikat sambil merayu Tiongkok sekaligus menghancurkan hubungan dengan Washington sembari mencela beberapa tindakan Beijing.⁹²

Untuk melestarikan norma dan lembaga demokrasi, bahkan dalam pandemi, pembuat kebijakan dan pemimpin masyarakat sipil di Asia Selatan dan Tenggara harus mengambil langkah-langkah berikut:

- *Bekerja untuk memastikan bahwa pembatasan terkait COVID-19 pada kebebasan berkumpul dan berbicara dibatasi secara hukum.* Meskipun masuk akal bagi para pemimpin untuk mengambil beberapa kekuasaan darurat untuk menegakkan karantina dan penutupan akses menyeluruh, legislator dan pengadilan di Asia Selatan dan Tenggara harus memastikan bahwa kekuasaan darurat diberikan dengan batasan waktu yang jelas dan pengawasan non-partisan, yang akan membantu memberikan informasi kepada pembuat kebijakan ketika tiba saatnya untuk memperpanjang kekuasaan darurat.⁹³ Pembuat kebijakan dan aktivis juga harus menggunakan kampanye publik untuk mendesak agar aplikasi atau tindakan *online* lainnya yang digunakan untuk pelacakan kontak diakhiri setelah virus berhasil dibendung dan tidak mengizinkan pemerintah untuk memantau populasi karena alasan lain.⁹⁴ Menerapkan batasan waktu dan memeriksa secara agresif potensi perpanjangan kekuasaan darurat merupakan posisi populer dan mendukung demokrasi.
- *Menyelenggarakan pemilu selama pandemi dan membuat pemilu berlangsung secara adil dan aman.* Aktivis prodemokrasi di kawasan ini harus bekerja untuk memastikan bahwa pemilu tidak ditunda atau dibatalkan dan pemilu yang direncanakan nantinya pada tahun 2020 dan 2021 di India dan Malaysia dapat diselenggarakan dengan aman. Jika pemerintah memang berencana untuk menundanya, mereka harus melakukannya hanya setelah melakukan konsultasi ekstensif

dengan partai oposisi dan masyarakat sipil, untuk mendapatkan dukungan luas atas penundaan tersebut dan memastikan bahwa penundaan tersebut tampaknya bersifat non-partisan dan tidak dirancang untuk menguntungkan salah satu partai atau politisi. Untuk menyelenggarakan pemilu dengan aman selama pandemi, negara-negara ini harus mendapatkan konsultasi tentang praktik pemberian suara terbaik dari para ahli di Singapura, Korea Selatan, dan negara lain di kawasan ini yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu selama pandemi; menawarkan berbagai cara untuk memilih, termasuk *slot* waktu yang disediakan untuk pemungutan suara secara langsung pada Hari Pemilu, pemungutan suara awal yang diperpanjang, dan pemungutan suara melalui surat dan jenis pemungutan suara jarak jauh lainnya di negara-negara yang memiliki layanan pos yang baik; dan mengundang pengamat pemilu internasional untuk memantau pemilu.

- *Membatasi dan melawan penggunaan disinformasi oleh pemimpin yang tidak liberal.* Pendukung norma demokrasi harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah para pemimpin menyebarkan disinformasi dan menghancurkan pemeriksaan atas wacana faktual, seperti organisasi pengawas dan saluran media independen yang tersisa. Ini sangat penting untuk memerangi disinformasi dan mendorong transparansi keputusan pemerintah, terutama di saat krisis. Upaya untuk melindungi organisasi-organisasi ini dapat melibatkan berbagai langkah, di antaranya adalah penggalangan dana publik bagi saluran media yang kehilangan iklan karena tekanan pemerintah pada bisnis; penegakan hukum untuk melindungi saluran media dan organisasi pengawas; dan mengatur tekanan dari pensiunan pemimpin, pemimpin masyarakat sipil terkemuka, dan pemimpin asing untuk menjaga agar saluran media dan organisasi pengawas tetap terbuka.
- *Mendemonstrasikan dan mempromosikan cara-cara protes yang aman COVID-19.* Apalagi di negara-negara seperti Thailand, yang sebagian besar berhasil menangani pandemi, para pemimpin sekarang memiliki lebih sedikit alasan untuk mempertahankan pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul di luar ruangan. Pendukung norma dan lembaga demokrasi harus menunjukkan bahwa mereka dapat mengadakan sesi parlemen, rapat umum, dan acara publik lainnya tanpa menyebarkan COVID-19. Di Thailand, misalnya, para demonstran yang telah berkumpul selama berbulan-bulan untuk mendukung reformasi demokrasi telah berulang kali mefokuskan diri pada langkah-langkah yang mereka ambil untuk melindungi kesehatan masyarakat saat berunjuk rasa. Beban kasus di Thailand tetap minimal meskipun unjuk rasa semakin intensif.⁹⁵ Di negara lain, siapa pun yang menyelenggarakan pertemuan publik harus melakukan hal yang sama, mengambil praktik terbaik dari Thailand dan tempat lain. Para pendukung demokrasi juga harus mengadvokasikan dengan tegas untuk mengakhiri pembatasan pada kebebasan berbicara secara *online* yang tidak menimbulkan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat.
- *Mempromosikan kompromi dan mengurangi polarisasi.* Polarisasi sudah terjadi sebelum berjangkitnya COVID-19, tetapi telah membantu para pemimpin yang tidak liberal memicu ketegangan dan memecah belah masyarakat, mempersulit norma demokrasi untuk berkembang dan menghambat para politisi untuk membangun koalisi luas yang dapat merongrong kecenderungan yang tidak liberal. Politisi dan pemimpin masyarakat sipil Asia Selatan dan Tenggara, didukung oleh penyandang dana dari negara maju, harus berinvestasi dalam berbagai upaya, seperti upaya yang dipimpin oleh kelompok lintas agama dan organisasi mediasi, untuk

mendorong dialog di antara partai politik, kelompok etnis, dan kelompok agama. Upaya awal untuk mempromosikan kompromi di Indonesia, yang sering kali dipimpin oleh kelompok lintas agama, telah berhasil membangun kepercayaan di kalangan pemimpin agama, yang kemudian mencoba untuk mengurangi polarisasi selama musim pemilu.

- *Menyoroti hubungan di antara politik yang tidak liberal dan tata kelola yang buruk, termasuk kesalahan penanganan COVID-19 dan kegagalan kebijakan ekonomi.* Pendukung demokrasi tergoda untuk memerangi pemimpin yang tidak liberal dengan menyoroti pelanggaran norma dan penyalahgunaan kekuasaan mereka. Namun, sejarah iliberalisme di Amerika Latin dan kawasan lain menunjukkan bahwa pemimpin populis yang tidak liberal khususnya, seperti keluarga Kirchner di Argentina, pada akhirnya menghadapi kejatuhan politik karena ketidakmampuan mereka untuk memerintah secara aktual dan bukan karena ketidaksetujuan publik terhadap pelanggaran norma mereka.⁹⁶ Saat mengambil langkah-langkah untuk melindungi lembaga-lembaga demokrasi, penentang pemimpin yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara harus memfokuskan kampanye mereka pada masalah ekonomi yang mendasar, COVID-19, dan tata kelola yang buruk secara umum, dengan alasan bahwa pembatasan kebebasan politik belum menghasilkan kebijakan kesehatan masyarakat yang lebih baik atas pandemi atau membantu meredam kesulitan ekonomi.
- *Mengembangkan kampanye publik untuk menekankan pentingnya saran dari para pakar kesehatan masyarakat dan bidang lainnya.* Sebagai akibat wajar dari menyoroti hubungan di antara politik yang tidak liberal dan tata kelola yang buruk, politisi daerah dan aktivis masyarakat sipil yang berkomitmen pada demokrasi harus menekankan bahwa pemimpin tidak liberal gagal mengendalikan pandemi karena mereka mengabaikan saran dari para pakar kesehatan, bukan karena saran dari para pakar kesehatan itu salah arah. Jika para pakar disalahkan atas tanggapan yang gagal terhadap pandemi COVID-19, pemimpin yang bahkan melanggar norma dan autokrasi dapat berkuasa. Memang, kebijakan penanganan pandemi yang gagal dapat semakin memicu gerakan anti-kemapanan, baik secara regional maupun global, disertai dengan ketidakpercayaan yang lebih besar terhadap keahlian kesehatan masyarakat dan hal-hal lainnya. Di seluruh dunia, dalam dekade terakhir, sentimen anti-kemapanan yang meningkat terkadang disalurkan ke dalam dukungan bagi politisi, seperti Emmanuel Macron dari Prancis atau Bernie Sanders dari Amerika Serikat, yang tidak menyerang praktik dan lembaga demokrasi. Namun, sering kali hal itu telah memberdayakan politisi yang meremehkan saran dari para pakar kesehatan, mempromosikan teori konspirasi, dan memiliki sedikit minat dalam menegakkan demokrasi.

Kekuatan dari luar kawasan juga dapat membantu melestarikan kebebasan di Asia Selatan dan Tenggara. Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa memiliki strategi regional yang mengandalkan pengembangan kebebasan. Dengan mendukung kelompok demokrat, bahkan selama pandemi masih membayangi, Amerika Serikat dapat menunjukkan komitmen terhadap pendekatan ini dan juga membedakan dirinya dari Tiongkok, yang sedang memperluas kekuasaannya di kawasan ini. Meskipun Tiongkok telah mendistribusikan bantuan terkait COVID-19 secara ekstensif, Tiongkok juga telah mengasingkan beberapa masyarakat Asia Selatan dan Tenggara dengan menyokong pemimpin yang tidak liberal, seperti Perdana Menteri Hun Sen dari Kamboja, dan tampaknya memanfaatkan gangguan pandemi untuk mendorong klaim teritorialnya di Laut China Selatan.⁹⁷

Untuk membantu mencegah para pemimpin regional agar tidak semakin merongrong norma dan lembaga demokrasi, Amerika Serikat dan negara demokrasi terkemuka lainnya harus melakukan hal berikut:

- *Mendukung upaya di Asia Selatan dan Tenggara untuk mengurangi polarisasi dan mendorong kompromi dan dialog politik.* Mengurangi polarisasi dan mendorong dialog akan membantu mengurangi kecenderungan politisi dan pemilih untuk memandang setiap pemilu sebagai sesuatu yang sangat menentukan sehingga mereka tidak boleh kalah. Demokrasi tidak dapat berkembang tanpa transisi kekuasaan yang damai, dan lingkungan yang lebih kondusif untuk kompromi dan dialog cenderung tidak menghasilkan pemimpin yang tidak liberal seperti Duterte atau keluarga Rajapaksa, yang memolarisasi negara-negara itu ketika mereka berkuasa.⁹⁸ Untuk mendukung upaya pengurangan polarisasi, negara-negara demokrasi terkemuka harus menghindari pemotongan anggaran promosi hak dan demokrasi serta pada hakikatnya meningkatkan anggaran mereka untuk pendanaan darurat bagi kelompok hak dan demokrasi di kawasan ini.⁹⁹ Meskipun pengurangan anggaran tampaknya merupakan tanggapan yang masuk akal dan perlu dilakukan terhadap kerugian ekonomi akibat pandemi COVID-19, anggaran untuk promosi hak dan demokrasi merupakan bagian kecil dari anggaran nasional bagi Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa sehingga pemotongan anggaran ini tidak akan memiliki dampak praktis dalam menangani pandemi atau masalah anggaran secara keseluruhan. Amerika Serikat, misalnya, memberikan sekitar \$2,6 miliar per tahun dalam pendanaan promosi demokrasi, yang dialokasikan dalam berbagai cara.¹⁰⁰ Anggaran tahunan pemerintah federal A.S. untuk tahun 2020 diproyeksikan mencapai \$6,6 triliun.¹⁰¹
- *Memerangi kampanye disinformasi pemimpin yang tidak liberal dan upaya untuk merongrong pers dan lembaga pengawas.* Negara demokrasi terkemuka dapat memerangi disinformasi dalam beberapa cara. Di Asia Selatan dan Tenggara, di mana pemimpin telah meningkatkan upaya disinformasi selama pandemi, saluran media independen telah efektif dalam mengungkapkan disinformasi semacam itu dan mengungkapkan serangan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap lembaga demokrasi. Negara-negara demokrasi terkemuka harus meningkatkan pendanaan bagi media independen dan organisasi pemeriksaan fakta di kawasan ini. Selain itu, Kongres A.S. harus menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Pandemi, yang akan mendorong cabang eksekutif untuk membuat rencana guna menangani pelanggaran hak selama pandemi.¹⁰²
- *Melawan penyampaian pesan Tiongkok dan Rusia bahwa negara-negara demokrasi gagal dalam pertempuran melawan COVID-19 dan bahwa negara otoriter berhasil.* Untuk memerangi penyampaian pesan Tiongkok dan Rusia bahwa negara-negara demokrasi gagal mengatasi pandemi COVID-19, Amerika Serikat dan negara demokrasi terkemuka lainnya harus memberikan lebih banyak tekanan pada *platform* media sosial untuk meneliti aktivitas agen disinformasi yang didukung negara dan merilis secara terbuka informasi tentang aktivitas mereka. Jika mereka menolak, pemerintah negara demokratis dapat mengatur perusahaan media sosial secara lebih agresif. Negara-negara demokrasi juga harus meningkatkan pendanaan untuk kegiatan kontra-propaganda mereka sendiri, seperti yang kegiatan di Pusat Keterlibatan Global Departemen Luar Negeri A.S.
- *Memastikan kebijakan domestik Amerika Serikat sendiri terhadap COVID-19 menghormati norma dan lembaga demokrasi serta menghargai saran dari para pakar kesehatan.* Amerika Serikat tidak

dapat mendukung hak dan kebebasan di Asia Selatan dan Tenggara jika pihaknya merongrong hak dan kebebasan di dalam negeri tanpa terlihat sangat munafik. Namun, hingga saat ini, Amerika Serikat belum secara efektif menyeimbangkan upaya memerangi COVID-19 dengan melindungi kebebasan di dalam negeri. Presiden Trump telah keliru menyatakan bahwa upaya untuk melindungi integritas pemilu nasional sekaligus menjaga kesehatan masyarakat—memperluas pemungutan suara melalui surat, misalnya—akan menyebabkan kecurangan yang merajalela dan pemilu yang dipertanyakan.¹⁰³ Namun demikian, Amerika Serikat perlu menunjukkan bahwa pihaknya akan menegakkan integritas pemilu selama pandemi, mempertahankan hak-hak dasar di dalam negeri, dan mengikuti saran dari pakar kesehatan masyarakat dalam menangani virus.

- *Menyelenggarakan konferensi bantuan utama untuk berfokus pada dampak COVID-19.* Di Asia Selatan dan Tenggara, seperti di kawasan berkembang lainnya, COVID-19 memiliki dampak bencana yang lebih besar pada perekonomian daripada dampak pada perekonomian di sebagian besar negara maju. Negara-negara kaya dapat dengan lebih mudah meluncurkan paket stimulus yang didanai oleh pinjaman internasional; hanya sedikit negara berkembang yang mampu menyamai jenis stimulus yang diluncurkan di Australia, Jepang, Eropa, atau Amerika Utara.¹⁰⁴ Meskipun penurunan kondisi perekonomian berkepanjangan di Asia Selatan dan Tenggara dapat menimbulkan kemarahan rakyat terhadap beberapa pemimpin yang kebijakannya telah menyebabkan kerugian ekonomi, penurunan kondisi perekonomian itu berisiko memperburuk ketidakesetaraan ekonomi dalam jangka panjang.¹⁰⁵ Dekade terakhir ini telah menunjukkan bahwa ketimpangan yang meningkat seperti itu memicu perpecahan politik, yang dapat memberi jalan bagi para pemimpin yang bahkan lebih tidak liberal untuk memanfaatkan kemarahan rakyat dan mungkin semakin merongrong kemajuan demokrasi. Untuk membantu mencegah ketimpangan yang lebih besar di Asia Selatan dan Tenggara, dan dengan demikian secara tidak langsung mendukung demokrasi, negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Uni Eropa harus mengadakan konferensi bantuan utama. Konferensi ini bisa mencontoh konferensi yang membantu Afganistan pada awal tahun 2000-an dan membantu negara-negara Asia selama krisis keuangan pada akhir tahun 1990-an. Konferensi tersebut akan dirancang untuk membantu perekonomian yang mengalami kerusakan paling parah akibat pandemi COVID-19, termasuk di Asia Selatan dan Tenggara. Bantuan tersebut, terutama hibah, dapat digunakan sebagian untuk membantu membayar vaksin tetapi sebagian besar akan digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Donor dapat menunjuk pengawas independen untuk menangani pencairan dana dan seorang inspektur jenderal untuk membuat laporan yang menganalisis bagaimana dana tersebut dibelanjakan.

Kesimpulan

Situasi kemajuan demokrasi tampak suram di Asia Selatan dan Tenggara. Meskipun kegagalan untuk mengatasi COVID-19 dapat berbalik merugikan politisi petahana, Duterte dan pemimpin populis tidak liberal lainnya saat ini besar kemungkinan lebih aman dalam menjabat daripada pemimpin populis lain sebelumnya, karena media sosial memudahkan mereka untuk mendistorsi informasi dan karena mereka lebih bersedia menggunakan represi kekerasan untuk tetap menjabat. Pemimpin populis yang tidak liberal dan pemimpin tidak liberal lainnya saat ini dapat melewati penjaga gerbang informasi tradisional, yang telah kehilangan pengaruh dalam dekade terakhir ini, dan menyampaikan pesan mereka yang sering kali terdistorsi secara langsung kepada publik melalui media sosial dan pers partisan. Selain itu, meskipun generasi pemimpin populis pada tahun 1990-an dan 2000-an menggunakan teknik seperti mengubah sistem pemungutan suara untuk memegang kekuasaan tetapi menghindari penargetan lawan secara kejam, generasi pemimpin populis saat ini lebih bersedia untuk memicu kekerasan terhadap politisi dan lawan lainnya dalam masyarakat sipil.¹⁰⁶

Meskipun terlihat suram, situasi di Asia Selatan dan Tenggara tetap tidak sesuram negara-negara berkembang lainnya. Meskipun lebih aman dalam menduduki jabatannya daripada generasi pemimpin populis yang tidak liberal sebelumnya, pemimpin Asia Selatan dan Tenggara lebih dibatasi dalam sejauh mana mereka dapat menindas demokrasi daripada rekan-rekannya di berbagai tempat seperti di Afrika, karena negara-negara Asia Selatan dan Tenggara telah membangun norma dan lembaga demokrasi yang relatif kuat sebelum pandemi datang. Dan pemimpin yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara, termasuk banyak pemimpin populis yang tidak liberal, bukanlah Xi Jinping atau Abdel Fatah al-Sisi. Tidak seperti pemimpin autokrasi sejati, mereka mempertahankan lapisan politik demokratis, mengizinkan pemilihan umum yang agak bebas dan adil, menoleransi partai-partai oposisi sembari juga mengganggu mereka, dan menerima beberapa tingkat aktivitas masyarakat sipil.¹⁰⁷ Kendala tersebut membuat pemimpin yang tidak liberal di Asia Selatan dan Tenggara lebih rentan daripada pemimpin autokrasi murni terhadap upaya reformasi nyata. Meskipun demikian, pemilihan umum yang agak bebas dan adil dan masyarakat sipil yang agak bebas memberikan dasar bagi demokratisasi yang lebih besar.

Mencegah pergeseran lebih jauh ke iliberalisme juga akan menguntungkan kepentingan strategis A.S. Sebagian besar sekutu perjanjian dan mitra terdekat Amerika Serikat di Asia dan Pasifik adalah negara-negara demokrasi, dan Amerika Serikat cenderung bekerja lebih efektif dengan negara-negara yang lebih besar di kawasan ini. Dan selain India, yang hubungan bilateralnya dengan A.S. telah berkembang bahkan ketika Modi telah merongrong demokrasi, negara-negara di kawasan ini yang pemimpinnya telah membalikkan kemajuan demokrasi sering kali menjadi tidak dapat diprediksi dalam hubungannya dengan Washington seperti dalam pendekatan terhadap masalah kebijakan dalam negeri dan luar negeri lainnya.

Tentang Penulis

Joshua Kurlantzick adalah peneliti senior di bidang Asia Tenggara di Council on Foreign Relations. Dia adalah penulis dengan karya terbarunya, *A Great Place to Have a War: America in Laos and the Birth of a Military CIA*. Kurlantzick sebelumnya adalah peneliti tamu di Carnegie Endowment for International Peace, di mana dia mempelajari politik dan ekonomi Asia Tenggara serta hubungan Tiongkok dengan Asia Tenggara, termasuk investasi, bantuan, dan diplomasi Tiongkok. Sebelumnya, dia adalah peneliti di University of Southern California Center on Public Diplomacy dan peneliti di Pacific Council on International Policy. Dia saat ini berfokus di bidang hubungan Tiongkok dengan Asia Tenggara dan pendekatan Tiongkok terhadap kekuatan lunak dan tajam, termasuk upaya media dan informasi yang didukung negara dan komponen lain dari kekuatan lunak (*soft power*) dan tajam (*sharp power*). Dia juga menangani masalah yang terkait dengan kebangkitan populisme global, populisme di Asia, dan efek COVID-19 pada populisme yang tidak liberal serta kebebasan politik. Dia adalah pemenang beasiswa Luce di bidang jurnalisme di Asia dan merupakan finalis Osborn Elliott Prize for Excellence in Journalism in Asia. Bukunya *Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transforming the World* dinominasikan untuk Arthur Ross Book Award 2008 CFR. Dia juga penulis *State Capitalism: How the Return of Statism Is Transforming the World* dan *Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline in Representative Government*. Kurlantzick menerima gelar sarjana di bidang ilmu politik dari Haverford College.

Catatan Akhir

1. Joshua Kurlantzick, "The Pandemic and Southeast Asia's Democratic Struggles," *Current History* 119, no. 818 (September 2020): 228–33, <http://online.ucpress.edu/currenthistory/article/119/818/228/111342/The-Pandemic-and-Southeast-Asia-s-Democratic>; Anubhav Gupta, "In Modi's India, Rights and Freedoms Erode Further Amid COVID-19," *World Politics Review*, 24 Juni 2020, <http://worldpoliticsreview.com/articles/28863/in-modi-s-india-rights-and-freedoms-erode-further-amid-covid-19>.
2. Thomas Carothers and Andrew O'Donohue, "Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers," Carnegie Endowment for International Peace, 18 Agustus 2020, <http://carnegieendowment.org/2020/08/18/political-polarization-in-south-and-southeast-asia-old-divisions-new-dangers-pub-82430>.
3. Ivan Krastev, "The Pandemic Was Supposed to Be Great for Strongmen. What Happened?," *New York Times*, 8 September 2020, <http://nytimes.com/2020/09/08/opinion/coronavirus-dictatorships.html>.
4. Joshua Kurlantzick, "How China Ramped Up Disinformation Efforts During the Pandemic," Council on Foreign Relations, 10 September 2020, <http://cfr.org/in-brief/how-china-ramped-disinformation-efforts-during-pandemic>.
5. Kurlantzick, "The Pandemic and Southeast Asia's Democratic Struggles." Catatan: Brunei, Laos, dan Vietnam adalah negara autokrasi murni dan tidak pernah membuat langkah nyata apa pun menuju demokrasi; oleh karena itu tidak dibahas dalam tulisan ini.
6. Joshua Kurlantzick, "Thailand's Push for Democracy Falsters as Junta Tightens Up on Civil Freedoms," *National*, 7 Mei 2015, <http://thenational.ae/arts-culture/thailand-s-push-for-democracy-falsters-as-junta-tightens-up-on-civil-freedoms-1.134903>; Shawn W. Crispin, "Thailand's Rising Crackdown on Dissent Sparks Coup Criticism," *Diplomat*, 7 Juli 2015, <http://thediplomat.com/2015/07/thailands-rising-crackdown-on-dissent-sparks-coup-criticism>; Joshua Kurlantzick, "Thailand's Junta Digs In," *Asia Unbound* (blog), 8 April 2016, <http://cfr.org/blog/thailands-junta-digs>.
7. Joshua Kurlantzick, "Thailand's Election: What to Know," Council on Foreign Relations, 20 Februari 2019, <http://cfr.org/in-brief/thailands-election-what-know>; Joshua Kurlantzick, "Thailand's Election Dirty Tricks," *Asia Unbound* (blog), 6 Maret 2019, <http://cfr.org/blog/thailands-election-dirty-tricks>.
8. Rebecca Ratcliffe, "Thai Court Dissolves Opposition Party Future Forward," *Guardian*, 21 Februari 2020, <http://theguardian.com/world/2020/feb/21/thai-court-dissolves-opposition-party-future-forward>.
9. Sheila Coronel, Mariel Padilla, and David Mora, "The Uncounted Dead of Duterte's Drug War," *Atlantic*, 19 Agustus 2019, <http://theatlantic.com/international/archive/2019/08/philippines-dead-rodrigo-duterte-drug-war/595978>; Joseph Hincks, "Philippines President Rodrigo Duterte Has Ordered the Arrest of a Chief Political Opponent," *Time*, 4 September 2018, <http://time.com/5385672/rodrigo-duterte-antonio-trillanes-arrest>; Yen Nee Lee, "Conviction of Philippine Journalist Points to 'Orchestrated Attempt' to Silence Duterte Critics," *CNBC*, 16 Juni 2020, <http://cnbc.com/2020/06/16/maria-ressas-conviction-attempts-to-silence-duterte-critics-expert-says.html>; "Philippines' Ousted Supreme Court Chief Lambastes Duterte," *Reuters*, 19 Juni 2018, <http://reuters.com/article/us-philippines-judiciary/philippines-ousted-supreme-court-chief-lambastes-duterte-idUSKBN1JF1D2>.
10. Freedom House, *Freedom in the World 2011: The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties* (New York: Rowman and Littlefield, 2011), http://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_2011_complete_book.pdf.
11. Maria Thomas, "The World's Largest Democracy Is Out to Stifle Its Already Docile Press," *Quartz India*, 3 April 2018, <http://qz.com/india/1243381/indias-modi-government-cracks-down-on-press-freedom-in-bid-to-fight-fake-news>; Danish Raza, "India Arrests Dozens of Journalists in Clampdown on Critics of COVID-19 Response," *Guardian*, 31 Juli 2020, <http://theguardian.com/global-development/2020/jul/31/india-arrests-50-journalists-in-clampdown-on-critics-of-covid-19-response>; Jeffrey Gettleman, Suhasini Raj, Kai Shultz, and Hari Kumar, "India Revokes Kashmir's Special Status, Raising Fears of Unrest," *New York Times*, 5 Agustus 2019, <http://nytimes.com/2019/08/05/world/asia/india-pakistan-kashmir-jammu.html>; Shoaib Daniyal, "Modi's 'Raid Raj' Could Easily Become a Tool to Target Political Opponents," *Scroll*, 28 Desember 2016, <http://scroll.in/article/825302/the-daily-fix-modis-raid-raj-could-easily-become-a-tool-to-target-political-opponents>; Press Trust of India, "Modi Government 'Targeting' Political Opponents With False Cases: Congress," *New Indian Express*, 31 Agustus 2019, <http://newindianexpress.com/nation/2019/aug/31/modi-government-targeting-political-opponents-with-false-cases-congress-2027191.html>; Lydia Finzel, "Democratic Backsliding in India, the World's Largest Democracy," *V-Dem*, 24 Februari 2020, <http://v-dem.net/en/news/democratic-backsliding-india-worlds-largest-democracy>; Sadanand Dhume, "In South Asia, Democracy Loses and Beijing Wins," *Wall Street Journal*, 28 November 2019, <http://wsj.com/articles/in-south-asia-democracy-loses-and-beijing-wins-11574967252>.
12. Penulis berterima kasih kepada Alyssa Ayres untuk poin ini.
13. Carothers and O'Donohue, "Political Polarization in South and Southeast Asia," 17–18.
14. Dhume, "In South Asia, Democracy Loses and Beijing Wins."
15. Penulis berterima kasih kepada Alyssa Ayres untuk poin ini.
16. Penulis berterima kasih kepada Alyssa Ayres untuk poin ini.
17. Arun Budhathoki, "Nepal and the Lurch Toward Digital Authoritarianism," *Diplomat*, 22 Maret 2019, <http://thediplomat.com/2019/03/nepal-and-the-lurch-toward-digital-authoritarianism>.
18. Joshua Kurlantzick, tinjauan *The Rise of Sophisticated Authoritarianism in Southeast Asia*, oleh Lee Morgenbesser, *Kyoto Review of Southeast Asia* 28 (2020), <http://kyotoreview.org/issue-28/review-the-rise-of-sophisticated-authoritarianism-in-southeast-asia>.
19. Tom Chitty, "Why Does Thailand Have So Many Coups?," *CNBC*, 20 Agustus 2019, <http://cnbc.com/2019/08/20/why-does-thailand-have-so-many-coups.html>.
20. Penulis berterima kasih kepada Richard Heydarian untuk poin ini.
21. "Tycoon or Thai Con?," *Economist*, 11 Januari 2001, <http://economist.com/leaders/2001/01/11/tycoon-or-thai-con>; "What Does Narendra Modi Want?," *Economist*, 24 Oktober 2019, <http://economist.com/special-report/2019/10/24/what-does-narendra-modi>

- want; “Philippines’ President Says He Killed Criminals to Protect Country,” Reuters, 16 Desember 2016, <http://reuters.com/article/us-philippines-duterte/philippines-president-says-he-killed-criminals-to-protect-country-idUSKBN14523P>.
22. Matt Wells, “Philippines: Duterte’s ‘War on Drugs’ Is a War on the Poor,” Amnesty International, 4 Februari 2017, <http://amnesty.org/en/latest/news/2017/02/war-on-drugs-war-on-poor>; Ana P. Santos, “Poverty Punished as Philippines Gets Tough in Virus Pandemic,” Al Jazeera, 13 April 2020, <http://aljazeera.com/news/2020/4/13/poverty-punished-as-philippines-gets-tough-in-virus-pandemic>.
23. “Mobocracy: An Interview with Jan-Werner Müller,” *Octavian Report* 3, <http://octavianreport.com/article/jan-werner-muller-populism-democracy-trump>; Jan-Werner Müller, *What Is Populism?* (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2016).
24. Hannah Ellis-Petersen and Shaikh Azizur Rahman, “Coronavirus Conspiracy Theories Targeting Muslims Spread in India,” *Guardian*, 13 April 2020, <http://theguardian.com/world/2020/apr/13/coronavirus-conspiracy-theories-targeting-muslims-spread-in-india>; Rodion Ebbighuasen, “Buddhists Fan Flames of Islamophobia in Southeast Asia,” Deutsche Welle, 27 Maret 2018, <http://dw.com/en/buddhists-fan-flames-of-islamophobia-in-southeast-asia/a-43158407>; Tom Allard and Shihar Aneez, “Police, Politicians Accused of Joining Sri Lanka’s Anti-Muslim Riots,” Reuters, 24 Maret 2018, <http://reuters.com/article/us-sri-lanka-clashes-insight/police-politicians-accused-of-joining-sri-lankas-anti-muslim-riots-idUSKBN1H102Q>; Phelim Kine, “Why Indonesia’s Christian Diaspora Fears Going Home,” *East Asia Forum*, 1 March 2018, <http://eastasiaforum.org/2018/03/01/why-indonesias-christian-diaspora-fears-going-home>; Wells, “Philippines: Duterte’s ‘War on Drugs’ Is a War on the Poor.”
25. Penulis berterima kasih kepada Alyssa Ayres untuk poin ini.
26. Carothers and O’Donohue, “Political Polarization in South and Southeast Asia.”
27. Carothers and O’Donohue, “Political Polarization in South and Southeast Asia.” Dalam beberapa hal, jenis polarisasi hidup atau mati ini juga telah menginfeksi Amerika Serikat, dengan partisan mengklaim bahwa pemilu mirip dengan pertempuran melawan teroris—“pemilu Penerbangan 93,” misalnya—di pihak lain, sehingga dengan demikian tindakan apa pun diperlukan untuk menghindari bencana langsung. Lihat, misalnya, Damon Linker, “The ‘Flight 93’ Election Has Ended in Disaster,” *Week*, 15 Juli 2020, <http://theweek.com/articles/925378/flight-93-election-ended-disaster>.
28. Larry Diamond, “Democratic Regression in Comparative Perspective: Scope, Methods, and Causes,” *Democratization*, 15 September 2020, <http://tandfonline.com/doi/full/10.1080/13510347.2020.1807517>.
29. “A Free and Open Indo-Pacific: Advancing a Shared Vision,” U.S. Department of State, 4 November 2019, <http://state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf>.
30. Zeeshan Aleem, “Trump Wants to Gut the State Department by 25 Percent. You Read That Right.” *Vox*, 12 Februari 2018, <http://vox.com/policy-and-politics/2018/2/12/17004372/trump-budget-state-department-defense-cuts>; Josh Rogin, “The Trump Administration Wants to Dismantle Ronald Reagan’s ‘Infrastructure of Democracy,’” *Washington Post*, 4 Maret 2018, http://washingtonpost.com/opinions/global-opinions/the-trump-administration-wants-to-dismantle-ronald-reagans-infrastructure-of-democracy/2018/03/04/8b94d7f6-1e54-11e8-ae5a-16e60e4605f3_story.html; Carol Morello, “Trump Administration Again Proposes Slashing Foreign Aid,” *Washington Post*, 10 Februari 2020, http://washingtonpost.com/national-security/trump-administration-again-proposes-slashing-foreign-aid/2020/02/10/2c03af38-4c4c-11ea-bf44-f5043eb3918a_story.html; Andrew Miller, “Congress Will Ignore Trump’s Foreign Affairs Budget Request. Others Will Not.” *Just Security*, 11 Juli 2019, <http://justsecurity.org/64879/congress-will-ignore-trumps-foreign-affairs-budget-request-others-will-not>; Colum Lynch, “Trump to Arab Protestors: I Stand With Your Rulers, Not You,” *Foreign Policy*, 1 November 2019, <http://foreignpolicy.com/2019/11/01/trump-arab-protests-lebanon-egypt-iraq>.
31. Humeyra Pamuk and Orhan Coskun, “Behind Trump-Erdogan ‘Bromance,’ a White House Meeting to Repair U.S.-Turkey Ties,” Reuters, 12 November 2019, <http://reuters.com/article/us-turkey-usa-trump-erdogan/behind-trump-erdogan-bromance-a-white-house-meeting-to-repair-u-s-turkey-ties-idUSKBN1XM0F0>; Peter Wade, “This Extensive Mashup Confirms Trump’s Love for Putin,” *Rolling Stone*, 31 Juli 2020, <http://rollingstone.com/politics/politics-news/video-mashup-confirms-trump-loves-putin-1037913>; “Trump Backs Sisi as He Seeks to ‘Reboot’ U.S.-Egypt Ties,” BBC, 3 April 2017, <http://bbc.com/news/world-middle-east-39478096>; Louis Nelson, “Trump Criticizes NATO Members Ahead of Summit,” *Politico*, 9 Juli 2018, <http://politico.com/story/2018/07/09/trump-criticize-nato-summit-702296>; Alexander Smith and Shannon Pettypiece, “NATO Gathering Descends Into Acrimony as Trump Criticizes Allies,” NBC News, 4 Desember 2019, <http://nbcnews.com/news/world/nato-summit-braces-friction-after-bruising-first-day-n1095296>; Rebecca Kheel, “Trump’s Relationship With Merkel Sinks Even Lower,” *Hill*, 11 Juli 2018, <http://thehill.com/policy/defense/396585-trumps-relationship-with-merkel-sinks-lower>; Damian Paletta and Joel Achenbach, “Trump Accuses Canadian Leader of Being ‘Dishonest’ and ‘Weak,’” *Washington Post*, 10 Juni 2018, http://washingtonpost.com/politics/trump-attacks-canada-to-show-north-korea-hes-strong-aide-says/2018/06/10/afc16c0c-6cba-11e8-bd50-b80389a4e569_story.html.
32. David E. Sanger and Maggie Haberman, “Trump Praises Duterte for Philippine Drug Crackdown in Call Transcript,” *New York Times*, 23 Mei 2017, <http://nytimes.com/2017/05/23/us/politics/trump-duterte-phone-transcript-philippine-drug-crackdown.html>.
33. Diamond, “Democratic Regression in Comparative Perspective.”
34. Amy Sawitta Lefevre and Pracha Hariraksapitak, “Thai Junta Claims Support From China, Vietnam Amid Western Unease,” Reuters, 4 Juni 2014, <http://reuters.com/article/us-thailand-politics/thai-junta-claims-support-from-china-vietnam-amid-western-unease-idUSKBN0EF0SA20140604>; Amy Sawitta Lefevre, “Thai Army Delegation Visits China Amid Western Reproach of Coup,” Reuters, 11 Juni 2014, <http://reuters.com/article/us-thailand-politics-china/thai-army-delegation-visits-china-amid-western-reproach-of-coup-idUSKBN0EM0FO20140611>.
35. Tom Allard and Prak Chan Thul, “Cambodia’s Hun Sen Has an Important Election Backer: China,” Reuters, 27 Juli 2018, <http://reuters.com/article/us-cambodia-election-china/cambodias-hun-sen-has-an-important-election-backer-china>.

idUSKBN1KI0IU; “China to Assist Cambodia With 2018 Elections After U.S., EU Withdraw Funding,” Radio Free Asia, 28 Desember 2017, <http://rfa.org/english/news/cambodia/assistance-12282017155101.html>.

36. Nate Schenkkan, “Keeping Democracy Healthy During a Pandemic,” Freedom House (newsletter), 30 Maret 2020, <http://freedomhouse.org/newsletter/keeping-democracy-healthy-during-pandemic-issue-1>.
37. Joshua Kurlantzick, “Rodrigo Duterte Goes Even Farther in Using COVID-19 to Crack Down,” *Asia Unbound* (blog), 8 Juni 2020, <http://cfr.org/blog/rodrigo-duterte-goes-even-farther-using-covid-19-crack-down>.
38. Carothers and O’Donohue, “Political Polarization in South and Southeast Asia,” 13–14.
39. Gupta, “In Modi’s India, Rights and Freedoms Erode Further Amid COVID-19.”
40. Amy Kazmin, “India’s Lockdown Extension Sparks Migrant Worker Protests,” *Financial Times*, 14 April 2020, <http://ft.com/content/f3751e84-9280-4021-bb30-5f51139bb7ec>.
41. Sonali Paul, “Australia’s COVID-19 Epicenter Extends Hard Lockdown Till Late September,” Reuters, 5 September 2020, <http://reuters.com/article/us-health-coronavirus-australia/australias-covid-19-epicenter-extends-hard-lockdown-till-late-september-idUSKBN25X009>; Anna Fifield, “New Zealand Isn’t Just Flattening the Curve. It’s Squashing It.” *Washington Post*, 7 April 2020, http://washingtonpost.com/world/asia_pacific/new-zealand-isnt-just-flattening-the-curve-its-squashing-it/2020/04/07/6cab3a4a-7822-11ea-a311-adb1344719a9_story.html; Krastev, “The Pandemic Was Supposed to Be Great for Strongmen. What Happened?.”
42. Peta Fuller, “New Zealand’s Level Four Coronavirus Lockdown Has Been Strict. Here Are Some of the Differences With Australia.” ABC News, 20 April 2020, <http://abc.net.au/news/2020-04-20/new-zealand-level-four-restrictions-compared-with-australia/12164798>; Justin Fendos, “How Surveillance Technology Powered South Korea’s COVID-19 Response,” *Tech Stream* (blog), 29 April 2020, <http://brookings.edu/techstream/how-surveillance-technology-powered-south-koreas-covid-19-response>.
43. Joe Cochrane, “Indonesia Sours on Democracy as Coronavirus Ravages Economy, Survey Finds,” *South China Morning Post*, 11 Juni 2020, <http://scmp.com/week-asia/politics/article/3088538/indonesia-sours-democracy-coronavirus-ravages-economy-survey>.
44. Joshua Kurlantzick, “Has Malaysia’s Democratic Experiment Imploded?,” *Asia Unbound* (blog), 16 Maret 2020, <http://cfr.org/blog/has-malaysias-democratic-experiment-imploded>.
45. Kurlantzick, “Rodrigo Duterte Goes Even Farther in Using COVID-19 to Crack Down.”
46. Richard C. Paddock, “Democracy Fades in Malaysia as Old Order Returns to Power,” *New York Times*, 22 Mei 2020, <http://nytimes.com/2020/05/22/world/asia/malaysia-politics-najib.html>; William Case, “COVID-19 Taps the Accelerator in Malaysian Politics,” *East Asia Forum*, 15 Juli 2020, <http://eastasiaforum.org/2020/07/15/covid-19-taps-the-accelerator-in-malaysian-politics>.
47. Bhavan Jaipragas, “Is Malaysia’s King Taking Sides in the Current Political Turmoil?,” *South China Morning Post*, 16 Oktober 2020, <http://scmp.com/week-asia/politics/article/3105871/malaysias-king-taking-sides-current-political-turmoil>.
48. Mary McDougall, “Bangladesh’s New Digital Law Will Silence Critics, Rights Groups Say,” CNN, 9 Oktober 2018, <http://cnn.com/2018/10/09/asia/bangladesh-digital-law-intl/index.html>.
49. McDougall, “Bangladesh’s New Digital Law Will Silence Critics”; “Bangladesh: Mass Arrests Over Cartoons, Posts,” Human Rights Watch, 7 Mei 2020, <http://hrw.org/news/2020/05/07/bangladesh-mass-arrests-over-cartoons-posts>.
50. Madiha Afzal, “The Pandemic Deals a Blow to Pakistan’s Democracy,” *Order From Chaos* (blog), 6 Agustus 2020, <http://brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/06/the-pandemic-deals-a-blow-to-pakistans-democracy>.
51. Sarah Repucci and Amy Slipowitz, “Democracy Under Lockdown: The Impact of COVID-19 on the Global Struggle for Freedom,” Freedom House, <http://freedomhouse.org/report/special-report/2020/democracy-under-lockdown>. (Penulis berpartisipasi dalam beberapa survei yang menginformasikan laporan ini.)
52. Sameer Yasir and Kai Shultz, “India Rounds Up Critics Under Shadow of Virus Crisis, Activists Say,” *New York Times*, 19 Juli 2020, <http://nytimes.com/2020/07/19/world/asia/india-activists-arrests-riots-coronavirus.html>.
53. “Indian Minorities Panel Faults Police Role in Delhi Riots Targeting Muslims,” Reuters, 17 Juli 2020, <http://reuters.com/article/us-india-citizenship-report/indian-minorities-panel-faults-police-role-in-delhi-riots-targeting-muslims-idUSKCN24H1JA>.
54. Eve Warburton, “Indonesia: Polarization, Democratic Distress, and the Coronavirus,” Carnegie Endowment for International Peace, 28 April 2020, <http://carnegieendowment.org/2020/04/28/indonesia-polarization-democratic-distress-and-coronavirus-pub-81641>.
55. Warburton, “Indonesia: Polarization, Democratic Distress, and the Coronavirus.”
56. Brett Meyer, “Pandemic Populism: An Analysis of Populist Leaders’ Responses to COVID-19,” Tony Blair Institute for Global Change, 17 Agustus 2020, <http://institute.global/policy/pandemic-populism-analysis-populist-leaders-responses-covid-19>.
57. Gupta, “In Modi’s India, Rights and Freedoms Erode Further Amid COVID-19.”
58. Rasheed Kidwai and Nagma Sahar, “Let’s Talk About How Tablighi Jamaat Turned COVID Hate Against Muslims Around,” *Print*, 12 Juli 2020, <http://theprint.in/opinion/lets-talk-about-how-tablighi-jamaat-turned-covid-hate-against-muslims-around/458728>.
59. Kidwai and Sahar, “Let’s Talk About How Tablighi Jamaat Turned COVID Hate Against Muslims Around.”
60. Stephanie Findlay and Jyotsna Singh, “India Cracks Down on Muslims Under Cover of Coronavirus,” *Financial Times*, 3 Mei 2020, <http://ft.com/content/34ad9282-74d7-4a85-a629-a9655339c366>; Amy Slipowitz, “Why We Should Be Worried About India’s Response to Coronavirus,” Freedom House, April 13, 2020, <http://freedomhouse.org/article/why-we-should-be-worried-about-indias-response-coronavirus>.
61. Kurlantzick, “How China Ramped Up Disinformation Efforts During the Pandemic”; Peter Rough, “How China Is Exploiting the Coronavirus to Weaken Democracies,” *Foreign Policy*, 25 Maret 2020, <http://foreignpolicy.com/2020/03/25/china-coronavirus>.

propaganda-weakens-western-democracies.

62. "Southeast Asia COVID-19 Tracker," Center for Strategic and International Studies, <http://csis.org/programs/southeast-asia-program/southeast-asia-covid-19-tracker>.
63. "COVID in the U.S.: Latest Map and Case Count," *New York Times*, diakses 11 Oktober 2020, <http://nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html>.
64. Karim Sadjadpour, "Iran's Coronavirus Disaster," Carnegie Endowment for International Peace, 25 Maret 2020, <http://carnegieendowment.org/2020/03/25/iran-s-coronavirus-disaster-pub-81367>; Michele A. Berdy, "How Russia's Coronavirus Crisis Got So Bad," *Politico*, 24 Mei 2020, <http://politico.eu/article/how-russias-coronavirus-crisis-got-so-bad-vladimir-putin-covid19>.
65. William Gallo, "South Koreans Preserve Democracy, Even During Pandemic," Voice of America, 15 April 2020, <http://voanews.com/east-asia-pacific/south-koreans-preserve-democracy-even-during-pandemic>; Michael G. Baker, Nick Wilson, and Andrew Anglemyer, "Successful Elimination of COVID-19 Transmission in New Zealand," *New England Journal of Medicine*, 7 Agustus 2020, <http://nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2025203>; Christina Farr, "Germany's Coronavirus Response Is a Master Class in Science Communication," CNBC, 21 Juli 2020, <http://cnbc.com/2020/07/21/germanys-coronavirus-response-masterful-science-communication.html>.
66. Repucci and Slipowitz, "Democracy Under Lockdown."
67. Krastev, "The Pandemic Was Supposed to Be Great for Strongmen. What Happened?."
68. Anthony Faiola and Ana Vanessa Herrero, "Protestors Paralyze Bolivia Over Election Delays, Threaten Escalation," *Washington Post*, 12 Agustus 2020, http://washingtonpost.com/world/the_americas/bolivia-protest-blockade-anez-evo-coronavirus/2020/08/11/7fceb50-db48-11ea-809e-b8be57ba616e_story.html; Stephania Taladrid, "Hunger, Infection, and Repression: Venezuela's Coronavirus Calamity," *New Yorker*, 29 Mei 2020, <http://newyorker.com/news/news-desk/hunger-infection-and-repression-venezuelas-coronavirus-calamity>.
69. Nelson Renteria, "El Salvador's President Disregards Top Court Rulings on Coronavirus," Reuters, 16 April 2020, <http://reuters.com/article/us-health-coronavirus-el-salvador/el-salvadors-president-disregards-top-court-rulings-on-coronavirus-idUSKCN21Y0IA>.
70. Istvan Hegedus, "Coronavirus and Democratic Erosion in Hungary," Carnegie Endowment for International Peace, 23 Juni 2020, <http://carnegieeurope.eu/2020/06/23/coronavirus-and-democratic-erosion-in-hungary-pub-82117>; "Freedom House Warns of Democratic Breakdown in Central, Eastern Europe," Radio Free Europe/Radio Liberty, 6 Mei 2020, <http://voanews.com/covid-19-pandemic/freedom-house-warns-democratic-breakdown-central-eastern-europe>.
71. Nate Schenkkan, "Democracy During a Pandemic: Russia and Southern Africa," Freedom House (newsletter), 11 Mei 2020, <http://freedomhouse.org/newsletter/keeping-democracy-healthy/democracy-during-pandemic-russia-and-southern-africa-issue-7>.
72. Sarah Yerkes, "Coronavirus Threatens Freedom in North Africa," Carnegie Endowment for International Peace, 24 April 2020 <http://carnegieendowment.org/2020/04/24/coronavirus-threatens-freedom-in-north-africa-pub-81625>.
73. Schenkkan, "Keeping Democracy Healthy During a Pandemic."
74. "Will the Legacy of COVID-19 Include Increased Authoritarianism?," Transparency International, 29 Mei 2020, <http://transparency.org/en/news/will-the-legacy-of-covid-19-include-increased-authoritarianism>.
75. Michelle Gavin, "The Authoritarian Politics of COVID-19 in Zimbabwe," *Africa in Transition* (blog), 18 Juni 2020, <http://cfr.org/blog/authoritarian-politics-covid-19-zimbabwe>.
76. Adi Robertson, "Senate Passes Surveillance Bill Without Ban on Web History Snooping," *Verge*, 14 Mei 2020, <http://theverge.com/2020/5/14/21257782/surveillance-bill-congress-senate-pass-usa-freedom-reauthorization-act>; Paul D. Shinkman, "Obama: 'Global War on Terror' Is Over," *U.S. News and World Report*, 23 Mei 2013, <http://usnews.com/news/articles/2013/05/23/obama-global-war-on-terror-is-over>; Robert E.G. Beens, "The State of Mass Surveillance," *Forbes*, 25 September 2020, <http://forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/09/25/the-state-of-mass-surveillance/#3dc95a3bb62d>.
77. Jason Castaneda, "Duterte Tightens Grip as the Philippines Falls Apart," *Asia Times*, 24 September 2020, <http://asiatimes.com/2020/09/duterte-tightens-grip-as-the-philippines-falls-apart>; Rudy Romero, "An Early Look at the 2022 Presidential Race," *Manila Standard*, 28 Januari 2020, <http://manilastandard.net/opinion/columns/business-class-by-rudy-romero/315908/an-early-look-at-the-2022-presidential-race.html>.
78. Era Dabla-Norris, Anne-Marie Gulde-Wolf, and Francois Painchaud, "Vietnam's Success in Containing COVID-19 Offers Roadmap for Other Developing Countries," International Monetary Fund, 29 Juni 2020, <http://imf.org/en/News/Articles/2020/06/29/na062920-vietnams-success-in-containing-covid19-offers-roadmap-for-other-developing-countries>.
79. Meyer, "Pandemic Populism: An Analysis of Populist Leaders' Responses to COVID-19."
80. Meyer, "Pandemic Populism: An Analysis of Populist Leaders' Responses to COVID-19."
81. Uri Friedman, "The Coronavirus-Denial Movement Now Has a Leader," *Atlantic*, 27 Maret 2020, <http://theatlantic.com/politics/archive/2020/03/bolsonaro-coronavirus-denial-brazil-trump/608926>; Ernesto Londoño, Manuela Andreoni, and Leticia Casado, "Bolsonaro, Isolated and Defiant, Dismisses Coronavirus Threat to Brazil," *New York Times*, 1 April 2020, <http://nytimes.com/2020/04/01/world/americas/brazil-bolsonaro-coronavirus.html>; Manuela Andreoni, "Coronavirus in Brazil: What You Need to Know," *New York Times*, 9 Oktober 2020, <http://nytimes.com/article/brazil-coronavirus-cases.html>.
82. "Brazil COVID Map and Case Count," *New York Times*, <http://nytimes.com/interactive/2020/world/americas/brazil-coronavirus-cases.html>.
83. Ed Yong, "How the Pandemic Defeated America," *Atlantic*, September 2020,

- <http://theatlantic.com/magazine/archive/2020/09/coronavirus-american-failure/614191>.
84. "COVID World Map: Tracking the Global Outbreak," *New York Times*, <http://nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html>.
85. Jeffrey Gettleman and Kai Shultz, "Modi Orders 3-Week Total Lockdown for All 1.3 Billion Indians," *New York Times*, 24 Maret 2020, <http://nytimes.com/2020/03/24/world/asia/india-coronavirus-lockdown.html>; Jeffrey Gettleman and Kai Shultz, "As India Loosens Its Strict Lockdown, Coronavirus Deaths Jump Sharply," *New York Times*, 6 Mei 2020, <http://nytimes.com/2020/05/06/world/asia/india-coronavirus-lockdown-infections.html>; Saheli Roy Choudhury, "India Shut Down Its Economy to Contain the Coronavirus. It's Now One of the Most Affected Countries," CNBC, 14 Juni 2020, <http://cnbc.com/2020/06/15/despite-lockdown-india-coronavirus-cases-ris-hurting-economy.html>.
86. Shivam Vij, "Narendra Modi Is Selling a Failed COVID Lockdown as a Success," *Print*, 1 Juli 2020, <http://theprint.in/opinion/narendra-modi-is-selling-a-failed-covid-lockdown-as-a-success/452191>.
87. Sameer Yasir and Jeffrey Gettleman, "India's Economy Shrank Nearly 24 Percent Last Quarter," *New York Times*, 31 Agustus 2020, <http://nytimes.com/2020/08/31/world/asia/india-economy-gdp.html>.
88. Richard Heydarian, "Philippines: Rodrigo Duterte's Response," *Asia Unbound* (blog), 14 April 2020, <http://cfr.org/blog/philippines-rodrigo-dutertes-response>; Pia Ranada, "Urong-sulong? 9 Confusing Rule Changes, Contradictions by Duterte's Coronavirus Task Force," *Rappler*, 16 September 2020, <http://rappler.com/newsbreak/iq/confusing-rule-changes-contradictions-duterte-coronavirus-task-force>.
89. Praveen Menon, "New Zealand PM Ardern's Ratings Sky High Ahead of Election," *Reuters*, 26 Juli 2020, <http://reuters.com/article/us-newzealand-election-ardern/new-zealand-pm-arderns-ratings-sky-high-ahead-of-election-idUSKCN24R0UI>; Matthew Karnitschnig, "Everybody Loves Merkel. Her Likely Successors? Not So Much." *Politico*, 20 Juli 2020, <http://politico.eu/article/germany-angela-merkel-complex-approval>; Jamie Smyth, "Jacinda Ardern Wins New Zealand Election by a Landslide," *Financial Times*, 17 Oktober 2020, <http://ft.com/content/30983bb9-a18b-428d-8484-ae54d6dbb7cb>.
90. Amanda Watts, "Fauci Says Normal Life May Not Be Back Until the End of 2021," *CNN*, 11 September 2020, <http://cnn.com/2020/09/11/health/fauci-normal-life-2021/index.html>.
91. "Cambodia: Freedom in the World 2020," *Freedom House*, <http://freedomhouse.org/country/cambodia/freedom-world/2020>. (Penulis bekerja sebagai konsultan untuk laporan negara Asia Tenggara Freedom House, termasuk laporan negara Kambojania.)
92. Richard Heydarian, "Duterte's U-Turn on Defense Pact With U.S. Shows China Threat," *Nikkei Asia*, 8 Juni 2020, <http://asia.nikkei.com/Opinion/Duterte-s-U-turn-on-defense-pact-with-US-shows-China-threat>; Richard Heydarian, "Twilight of Duterte Presidency Might Also Mean Last Days of Philippines' Long Entanglement With the U.S.," *South China Morning Post*, 4 Januari 2020, <http://scmp.com/news/china/diplomacy/article/3044531/twilight-duterte-presidency-might-also-mean-last-days>.
93. Repucci and Slipowitz, "Democracy Under Lockdown."
94. Larry Diamond, "Democracy Versus the Pandemic," *Foreign Affairs*, 13 Juni 2020, <http://foreignaffairs.com/articles/world/2020-06-13/democracy-versus-pandemic>.
95. "Southeast Asia COVID-19 Tracker," Center for Strategic and International Studies.
96. Shannon K. O'Neil, "Latin America's Populist Hangover," *Foreign Affairs* 95, no. 6 (November/Desember 2016), <http://foreignaffairs.com/articles/americas/2016-09-27/latin-america-s-populist-hangover>.
97. Robert A. Manning and Patrick M. Cronin, "Under Cover of Pandemic, China Steps Up Brinkmanship in South China Sea," *Foreign Policy*, 14 Mei 2020, <http://foreignpolicy.com/2020/05/14/south-china-sea-dispute-accelerated-by-coronavirus>.
98. Carothers and O'Donohue, "Political Polarization in South and Southeast Asia."
99. Repucci and Slipowitz, "Democracy Under Lockdown."
100. "Democracy Promotion: An Objective of U.S. Foreign Assistance," Congressional Research Service, 4 Januari 2019, <http://fas.org/sgp/crs/row/R44858.pdf>.
101. "Budget Projections," Congressional Budget Office, diperbarui 2 September 2020, <http://cbo.gov/topics/budget>.
102. Repucci and Slipowitz, "Democracy Under Lockdown."
103. Jim Rutenberg, "How Trump's 'Voter Fraud' Lie Is Disenfranchising Americans," *New York Times Magazine*, 30 September 2020, <http://nytimes.com/2020/09/30/magazine/trump-voter-fraud.html>.
104. James Crabtree, "The End of Emerging Markets?," *Foreign Policy*, 3 Mei 2020, <http://foreignpolicy.com/2020/05/03/emerging-markets-coronavirus-pandemic-economic-fallout>.
105. "UN Report Finds COVID-19 Is Reversing Decades of Progress on Poverty, Healthcare, and Education," United Nations, 7 Juli 2020, <http://un.org/development/desa/en/news/sustainable/sustainable-development-goals-report-2020.html>.
106. Joseph Hincks, "Duterte Is Assassinating Opponents Under Cover of the Drug War, Philippine Rights Groups Say," *Time*, 5 Juli 2018, <http://time.com/5330071/philippines-mayors-political-assassination-duterte>; Jason Gutierrez, "Duterte Says He Ordered a Politician Killed; a Spokesman Says He Misspoke," *New York Times*, 18 September 2019, <http://nytimes.com/2019/09/18/world/asia/philippines-rodrigo-duterte-assassination.html>.
107. Kurlantzick, tinjauan *The Rise of Sophisticated Authoritarianism in Southeast Asia*.